



GERAKAN SAREKAT ISLAM (SI)-MERAH

(Persinggungan antara Islam dan Komunis di Indonesia Tahun 1920-1926)

Tesis

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Humaniora (M. Hum)
Dalam Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Islam di Indonesia

Oleh:

KARTIKA SARI

NIM: 080301105

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2011

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Gerakan komunis di Indonesia menjadi babak penting dalam sejarah Indonesia. Yang paling diingat dan selalu ditanamkan pada masyarakat, terutama pada masa Orde Baru, adalah bahwa PKI merupakan “masa kelam” sejarah Indonesia. Gerakan tanggal 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan G30S/PKI menimbulkan stigma bahwa PKI adalah partai “hitam”.

Pada konteks awal 1920-an, banyak tokoh Islam yang berafiliasi kepada Marxisme dalam ideologi perjuangannya. Kecenderungan pada pemikiran Marxis merupakan dampak dari banyaknya media cetak, atau buku-buku tentang Marxisme yang beredar pada waktu itu. Pemikiran Karl Marx yang revolusioner dan radikal, dianggap sesuai dengan metode perjuangan dari penindasan oleh sebagian tokoh Islam. Tokoh-tokoh seperti Hadji Misbach di Surakarta, Hadji Achmad Chatib di Banten dan Hadji Datuk Batuah di Padang Panjang, Sumatera Barat merupakan contoh tokoh Islam yang berpaham komunis (Huda, 2007: 150). Dengan kerangka pemikiran komunis, ketiga tokoh Islam tersebut telah melakukan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintah kolonial Belanda dan para pemimpin tradisional pribumi. Mereka berusaha memperjuangkan dan membebaskan rakyat dari penindasan, ketidakadilan, yang sering dilakukan oleh kelompok di atas.

Di Surakarta, ciri khas gerakan komunis adalah berusaha memadukan antara Marxisme dan Islam. Tokoh yang memunculkan gagasan ini adalah Hadji Misbach. Khutbahnya mengenai doktrin dalam Islam dan komunisme itu sama, membuat dirinya terkenal dengan “haji merah”. Semua ini dilakukannya untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu kebebasan dari penindasan, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Haji

Misbach sangat aktif dalam gerakan radikal yang menentang kedua istana – Kasunanan dan Mangkunegaran – di Surakarta, perusahaan perkebunan dan *gubernemen*. Gerakan komunis di Surakarta mulai tidak lama sesudah Hadji Misbach dikeluarkan dari penjara Pekalongan dalam bulan Agustus 1922 (Ricklefs, 1993: 264). Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap kekacauan yang sedang terjadi di masyarakat, terutama yang disebabkan oleh kekacauan yang bersifat ekonomis.

Gerakan komunis di Surakarta dirintis Hadji Misbach dimulai ketika ia menghadiri pertemuan Sarekat Islam (SI) di Pekalongan, Semarang dan Madiun. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Misbach selalu mengarahkan SI berpaling pada komunis. Dalam bulan Februari dan Maret 1923, ia bersama sebuah komite (beranggotakan 13 orang) mencoba menghidupkan kembali SI cabang Surakarta, yang pada waktu itu sudah mati, ke arah komunis. Namun usahanya gagal dan komitenya tenggelam. Berdasar laporan Residen Surakarta Van der Marel yang menulis dalam bulan Februari 1924 bahwa SI cabang Surakarta sudah tidak ada (Larson, 1990: 194). Kegagalan untuk menghidupkan kembali SI Surakarta disebabkan oleh perpecahan yang semakin besar antara kubu “Islam” dan “Marxis”. SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu “SI-Merah” yang berhaluan komunis dan “SI-Putih” yang berhaluan agama (Islam) (Pringgodigdo, 1991: 20). Akhirnya pada kongres SI di Madiun – 17 sampai 20 Februari 1923 – dikeluarkan keputusan mengenai pengusiran permanen orang-orang komunis dari SI.

Misbach sangat menentang keputusan ini dan ia memilih “SI-Merah” dan menghadiri kongres khusus PKI dan “SI-Merah” yang diadakan di Bandung pada 4 Maret 1923. Di sana ia menegaskan kembali prinsip-prinsip yang dipegang bersama oleh ajaran Marxis dan Islam, seperti menghormati hak asasi dan melawan penindasan (Larson, 1990: 198). Dengan demikian ia menegaskan kembali anutannya terhadap

“komunisme Islam”. Pada waktu yang sama, ia memulai permusuhan terhadap “SI-Putih” yang dipimpin Tjokroaminoto.

Untuk menarik massa yang lebih besar, Misbach mendekati beberapa kelompok kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, Ia sendiri membentuk kelompok Karawitan di rumahnya dan di beberapa rumah kawannya. Selain itu, ia mendirikan sebuah biro informasi dengan tujuan untuk memperoleh dana dan menyalurkan propaganda. Namun kedua usaha tersebut tidak berhasil sampai akhirnya ia bersama-sama dengan Moetakallimoen, Partoadmodjo, Sastropanitro, Soewarno, Sandjojo, Sjarief, Hardjodiwongso dan beberapa teman lain, mendirikan SI-Merah di Surakarta. Tujuan utamanya adalah membina pengikut melalui himbauan keras dalam kerangka ajaran Islam berhaluan komunis (Larson, 1990: 199). Pembentukan organisasi ini menunjukkan usaha kuat Misbach dalam menegakkan prinsip komunisme yang dianutnya.

Pergerakan Misbach dalam menyebarkan prinsip komunisme diwarnai dengan radikalisme Petani yang mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi Surakarta pada masa revolusi. Ideologi komunis yang tersebar luas telah menjadikan wilayah Surakarta sebagai daerah konflik yang senantiasa dikuasai oleh orang-orang komunis.

Gerakan komunis juga terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Ideologi komunis di daerah ini diperkenalkan secara diam-diam oleh Magas yang pernah tinggal di Jawa dan berhubungan dengan orang-orang partai komunis di sana. Pada Maret 1923, sebuah cabang PKI didirikan di Padang oleh Magas, dan tidak lama kemudian orang-orang komunis yang bersikap lebih sekuler mulai bergerak.

Ajaran komunis di Padang dikembangkan oleh Hadji Datuk Batuah, dibantu oleh Djamaluddin Tamin dan Natar Zainuddin, yang ia kenal dalam perjalanannya ketika melakukan lawatan ke Jawa dan Aceh. Setelah kembali dari lawatannya, ia bersama kedua temannya tersebut, mulai mengembangkan sebuah paham baru yang disebut

dengan “ilmu kuminih”. Inti dari ajaran tersebut adalah bahwa komunisme itu “benci kepada pemerintah Belanda yang kafir”. Dengan menggunakan dalil Al-Qur’an dan hadits, umat Islam diwajibkan melawan penindasan kaum kafir, karena penjajahan kaum kapitalis-imperialis bertentangan dengan ajaran Islam. Seseorang belum dikatakan Islam yang sebenarnya kalau tak peduli dan membiarkan penjajahan bercokol di negerinya (Huda, 2007: 159). Melalui paham tersebut, ajaran komunis di Padang dikembangkan dengan memasukkan unsur-unsur keislaman.

Ayat-ayat yang termaktub dalam surat Al-Anfal dan Al-Taubah yang berisi tentang perjuangan sering digunakan untuk menjelaskan perjuangan umat yang disejajarkan dengan perjuangan dalam gerakan komunis (Huda, 2007: 159). Dengan demikian, “ilmu kuminih” merupakan percampuran antara teologi Islam dengan Radikalisme Marxisme yang dikembangkan di Padang Panjang.

Paham komunisme dan Islam yang disebut oleh Datuk Batuah dengan istilah “Islam revolusioner” diterima sebagai gerakan Islam alternatif oleh masyarakat Minangkabau setelah jatuhnya nama SI Sumatera Barat karena isu korupsi yang dilakukan para pemimpinnya. Ajaran komunisme yang dipahami disejajarkan dengan spirit perjuangan Islam. Konsep “perjuangan kelas” yang menjadi dasar dalam melihat ketimpangan dalam masyarakat ajaran komunisme, lebih menekankan ajaran fikih dari sudut sosial dan politis daripada ideologi murni komunis itu sendiri. Dalam jangka waktu yang sangat singkat gerakan ini sudah menyebar ke luar Padang Panjang dan beberapa *nagari* di sekitarnya. Gerakan ini juga diwarnai pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial (Huda, 2007: 160-161). Sama halnya dengan gerakan di Surakarta, isu ketimpangan sosial menjadi senjata ampuh dalam menarik massa ke dalam gerakan ini.

Sementara itu gerakan komunis di Banten juga melibatkan banyak ulama. Ulama perintisnya adalah Hadji Achmad Chatib. Sebagaimana Hadji Misbach, Chatib

pun menegaskan bahwa terdapat kesesuaian yang mendasar antara Islam dan komunisme (Budiawan, 2004: 88). Kaum ulama dan para pemimpin Banten lainnya yang berlatar belakang Islam tidak hanya bersimpati, tetapi juga bertindak sebagai propagandis-propagandis PKI, tentu saja tidak semua ulama bergabung dengan PKI, tetapi hanya sedikit yang suka berbicara menentang PKI. Umumnya, mereka berpendirian bahwa pemerintah Belanda itu kafir.

Penduduk Banten yang mayoritas Islam yang kebanyakan adalah para petani gurem secara turun temurun menemukan kepemimpinan sosial dan politik mereka dalam diri ulama. Karenanya mereka menerima komunisme yang menawarkan suatu perspektif dan strategi baru dalam menentang pemerintahan kolonial. Bagi kalangan PKI kebencian para ulama terhadap pemerintah Kolonial tersebut merupakan sumber penting untuk propaganda. Para propandis partai tidak pernah berhenti menyatakan bahwa Islam tidak mungkin bebas di bawah pemerintahan kafir. Namun, di bawah komunisme, agama tidak akan menjadi sasaran pelanggaran seperti yang dilakukan oleh para penguasa kolonial. Beberapa pimpinan PKI yang berasal dari latar belakang religius sangat mahir mengutip ayat Al-Qur'an sehingga mereka dengan mudah bisa masuk di kalangan para ulama (Huda, 2007: 162-163). Terlepas dari retorikanya yang religius, PKI tidak pernah mengaku diri sebagai organisasi Islam. PKI hanya berjanji untuk menghargai dan melindungi agama. Ia hanya menawarkan jalan bagi kebebasan beragama dan politik. Ini terlihat dari propaganda PKI, bahwa komunisme akan membawa kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya akan menegakkan kebebasan menunaikan ajaran-ajaran agama (Semaoen, 2000: 133). Tampaknya propaganda PKI ini telah menarik hati para ulama, yang dapat membebaskan mereka dari belenggu larangan-larangan pemerintah kolonial.

Paham komunis yang tumbuh subur di beberapa daerah tersebut tidak selalu berlangsung dengan lancar. Tindakan kekerasan di wilayah pedalaman Jawa semakin

meningkat pada awal 1924, ketika bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan diri "Sarekat Hijau", terutama di Priangan. Kelompok-kelompok tersebut merupakan gerombolan penjahat, para anggota polisi dan para kyai yang mendapat dukungan pemerintah Belanda dan pejabat priyayi. Dan pada awal 1925, Sarekat Hijau mulai menyerang setiap rapat yang diadakan oleh PKI dan SI-Merah serta mengancam anggota mereka (Ricklefs, 2005: 370).

Dalam pandangan umum, ada kesan bahwa barangkali tidak ada agama yang terbukti lebih berani menentang komunisme selain Islam. Namun terdapat kenyataan bahwa di dalam babak sejarah tertentu di negeri tertentu, suatu gerakan komunis yang bersinggungan dengan Islam bernama SI-Merah telah berkembang dan inilah fakta yang pernah terjadi di Indonesia pada dekade tahun 1920-an.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih komprehensif gerakan ini, dan mengangkatnya dalam tesis dengan judul "**Sarekat Islam (SI)-Merah (Persinggungan antara Islam dan Komunis di Indonesia) Tahun 1920-1926**"

Batasan dan Rumusan Masalah

Gerakan komunis di Indonesia mengambil bagian sejarah yang cukup panjang sampai berakhirnya pemberontakan PKI pada September 1965. Salah satu fakta menarik yang timbul adalah bahwa adanya persinggungan antara Islam dengan komunis yang tercermin dalam perpecahan Sarekat Islam, sehingga dalam tesis ini penulis hanya membatasi kajian tersebut dalam rentang waktu 1920-1926.

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi timbulnya gerakan SI-Merah di Indonesia dalam rentang waktu 1920-1926 ?

2. Bagaimana perkembangan SI-Merah di Indonesia pada rentang waktu 1920-1926 ?
3. Bagaimana persinggungan antara Islam dan komunis di Indonesia pada rentang waktu 1920-1926 ?

Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada rumusan pertanyaan yang diajukan pada pokok-pokok masalah penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami latar belakang timbulnya gerakan SI-Merah di Indonesia dalam rentang waktu 1920-1926.
2. Untuk mengetahui pergerakan SI-Merah di Indonesia pada rentang waktu tersebut
3. Untuk mengetahui persinggungan antara Islam dan komunis di Indonesia pada rentang waktu tersebut.

Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif yang dapat membuka wawasan dan bermanfaat baik bagi insan akademis maupun masyarakat umum dalam mengembangkan pemahaman di bidang sejarah Islam, terutama pengetahuan tentang gerakan SI-Merah di Indonesia pada 1920-1926.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diajukan sebagai sumber acuan dan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya dalam konteks persinggungan antara SI-Merah yang berhaluan komunis dengan Islam.
3. Secara Khusus, hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian bagi sebuah organisasi, terutama dalam hal perekrutan anggota agar benar-benar diperhatikan untuk mencegah munculnya paham-paham yang dapat mengancam keberlangsungan suatu organisasi.

Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian ini ada beberapa buku, antara lain karya Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah*, yang menguraikan satu periode krusial dalam sejarah Indonesia karena menjadi tonggak kelahiran gerakan kaum Marxis pertama di Indonesia. Dalam karyanya ini, Gie mengungkapkan awal munculnya SI-Merah. Karya lain yang relevan adalah A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Perjuangan Rakyat Indonesia*. Dalam tulisannya ini Pringgodigdo menguraikan konflik dalam tubuh Sarekat Islam antara komunis dengan Islam.

Kemunculan SI dan pertikaianya dengan SI-Merah diungkapkan dalam karya Deliar Noer yang berjudul *Gerakan Modern Islam di Indonesia Tahun 1900-1942*. Karya berikutnya adalah George D. Lason, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Publik di Surakarta, 1912-1942*, dan M.C. Ricklef dengan judul *Sejarah Indonesia Modern Tahun 1200-2004*. Kedua sumber ini memberikan gambaran pergerakan tokoh “SI merah” di Surakarta. Terakhir, karya Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual di Indonesia*, yang menggambarkan gerakan SI-Merah di Indonesia secara umum.

Dari semua kajian-kajian di atas dan yang sampai ke tangan penulis, hanya mengungkap sebagian dan singkat mengenai gerakan SI-Merah di Indonesia. Belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema tersebut tahun 1920-1926 secara komprehensif.

Definisi Operasional

Secara operasional, judul tesis ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

Gerakan didefinisikan sebagai perbuatan atau keadaan bergerak, pergerakan adalah usaha atau kegiatan pada lapangan sosial (politik dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1984: 317)

Sementara Sarekat Islam-Merah adalah sebuah organisasi yang semula merupakan bagian dari Sarekat Islam dan berubah menjadi organisasi politik berhaluan kiri dengan menyanggah nama Merah yang diberikan oleh para sejarawan antara lain: Ruth T. McVey, Mc. Ricklefs, George D. Lason, Takashi Shiraishi, dan Soe Hok Gie . Islam didefinisikan sebagai agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW (Poerwadarminta, 1984: 388). Sedangkan Komunis atau komunisme diartikan sebagai paham atau usaha dalam lapangan politik yang bermaksud menghapuskan hak milik perseorangan, sama rata sama rasa (Poerwadarminta, 1984: 518). Dengan demikian, Gerakan Sarekat Islam-Merah merupakan suatu gerakan sosial politik berbasiskan Islam yang berhaluan kiri.

Kerangka Teori

Kerangka konseptual dan teoritik dalam penelitian sejarah, terutama pada sifatnya yang kausalitas, biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah tentang proses perubahan. Hal ini sangat lazim dalam pemikiran sejarah, karena suatu proses sejarah pada dasarnya adalah juga proses perubahan (Ankersmith, 1987: 192). Terkait dengan relevansi sejarah dengan perubahan ini, maka dapatlah dikatakan bahwa asas pengembangan kerangka konseptual bagi penelitian sejarah lebih ditekankan kepada perspektif perubahan tersebut.

Menurut Poloma (1984), seperti yang dikutip Abdurahman, secara umum, perkembangan peristiwa dalam kurun waktu tertentu memang bertemu dengan macam-macam perubahan yang mempengaruhinya. Mengenai perubahan sosial misalnya, pendekatan sejarah perlu melacak struktur sosial yang melatarbelakangi perubahan-perubahan dalam masyarakat, termasuk konflik-konflik sosial dan kepentingan, sistem-sistem tradisional dan keagamaan, dan pola hubungan antarkelompok dalam masyarakat yang bersangkutan (Abdurahman, 2007: 37). Kemudian peristiwa-peristiwa itu di dalam

gejalanya yang lebih kompleks dapat pula dilihat dari adanya transformasi struktural, yang ditelusuri dari adanya proses integrasi dan disintegrasi, atau disorganisasi dan reorganisasi, dan proses perubahan jenis-jenis solidaritas dalam sejarah.

Banyak teori yang dikemukakan ahli sejarah maupun sosial tentang konsep perubahan dan model-modelnya. Ada dua model penting tentang perubahan yang dikemukakan Spencer dan Marx. Model Spencer, yang bersifat evolutif dan linear, adalah model yang menekankan pada evolusi sosial, yakni perubahan berlangsung secara pelan-pelan dan kumulatif, dan perubahan ditentukan dari dalam (endogen). Dalam hal ini menurut Spencer, perubahan terjadi dari homogenitas yang tidak koheren ke heterogenitas koheren (Abdurrahman, 2007: 38).

Berbeda dengan model Spencer, perubahan model Marx (model konflik) menggambarkan model atau tahapan perkembangan masyarakat yang revolusioner. Perubahan dalam model ini secara umum melihat perkembangan masyarakat bergantung pada sistem ekonomi dan mengandung konflik-konflik sosial yang mengakibatkan timbulnya krisis, revolusi dan perubahan yang terputus-putus. Model ini tidak hanya memberi tempat bagi penjelasan perubahan-perubahan dari perspektif eksogen (luar), tapi juga memberi penjelasan lebih global yang menekankan relasi antara perubahan suatu masyarakat dan perubahan di masyarakat lain (Abdurrahman, 2007: 39). Dengan kata lain, model Marx lebih memperhatikan mekanisme perubahan yang ditekankan pada revolusi.

Dengan mengacu pada dua teori perubahan sosial di atas, kekuatan dan kelemahan keduanya dapat dimodifikasi sebagai sebuah sintesis dalam mengkaji titik singgung yang terjadi antara Islam dan komunis dalam penelitian ini. Mengikuti pendapat Burke, seperti yang dikutip oleh Abdurahman (Abdurrahman, 2007: 40), bahwa implikasi model-model perubahan seperti itu secara sintesis adalah penolakan secara hitam putih terhadap tiga dikotomi, yaitu antara kontinuitas dan perubahan;

faktor internal dan eksternal; serta antara struktur dan peristiwa. Dimana konsepsi perubahan pada dasarnya selalu terkait dengan konsepsi kontinuitas.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka fokus penelitian secara teoritis dan konseptual adalah mengkaji titik persinggungan Gerakan Sarekat Islam-Merah dengan Komunis pada tahun 1920-1926.

Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

1.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

1.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah hasil penelitian atau tulisan-tulisan yang orisinal, yaitu karya Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah*. Sedangkan data sekunder adalah tulisan-tulisan yang berupa sintesis terhadap karya hasil penelitian yang orisinal. Data ini dapat berupa ensiklopedi, jurnal, majalah ilmiah dan lain-lain (Zulkifli, 2001: 59). Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode historis, yang mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

a. Heuristik

Penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam usaha memperoleh data mengenai subjek yang terkait secara langsung (Kuntowijoyo, 1994: 50). Data primer mengenai penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini. Sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal, majalah, dokumen dan situs internet yang berkaitan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

b. Kritik Sumber

Selanjutnya penulis melakukan kritik terhadap sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Kritik sumber berguna untuk menentukan apakah sumber sejarah

yang ada dapat dipergunakan atau tidak dan juga untuk melihat kebenaran dari sumber tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang kemudian dikumpulkan dan diseleksi sebagai tahap akhir pengumpulan data.

3. Teknik Analisa Data

- Interpretasi

Pada langkah ini penulis berusaha menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh, kemudian diberi penafsiran untuk merekonstruksi peristiwa sejarah sehingga dapat dimengerti

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992: 16). Selain itu juga digunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif. Dilengkapi dengan analisis kritis (Nazir, 1988: 405).

Abdurahman (2007: 38), mengutip dari Burke (2001), menyatakan bahwa pengembangan metodologi sejarah yang berkenaan dengan perubahan-perubahan suatu peristiwa, sedikitnya didasarkan pada dua arah yang berlawanan. *Pertama*, melakukan deduksi dari umum ke yang khusus, dengan meperbandingkan model-model umum perubahan sejarah untuk melihat apa model-model peristiwa yang ditemukan dan dapat dimodifikasi. *Kedua*, melakukan induksi dari yang khusus ke yang umum dalam upaya menggambarkan proses perubahan pada masyarakat tertentu, dan untuk mencari keseimbangan beberapa refleksi tentang hubungan problematisitas antara peristiwa dan struktur. Perubahan sosial dalam studi sejarah adalah perubahan struktur dan fungsi, yang dilihat atau digunakan dalam menganalisis perubahannya itu mencakup

perkembangan berbagai peristiwa, sehingga dalam penarikan kesimpulannya penulis menggunakan metode induksi.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang jenisnya termasuk kajian pustaka (*library research*), yaitu mengkaji literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan rekonstruksi yang *total history*, diperlukan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan sosiologi, antropologi, politik dan filsafat. Keempat pendekatan ini digunakan dalam mengkaji gerakan Sarekat Islam Merah serta dalam mencari titik singgung antara Islam dan komunisme dalam tubuh Sarekat Islam Merah.

Pendekatan sosiologi meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, mencakup golongan sosial yang berperan, nilai-nilainya, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan sebagainya (Rochmat, 2009: 56)

Pendekatan antropologi mengungkapkan nilai-nilai, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan dan pola hidup, yang mendasari perilaku tokoh sejarah (Kartodirdjo, 1992: 4). Secara metodologis pendekatan antropologi memperluas jangkauan kajian sejarah yang mencakup: 1) kehidupan masyarakat secara komprehensif dengan mencakup berbagai dimensi kehidupan sebagai totalitas sejarah; 2) aspek-aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik) dengan mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan aspek-aspek kehidupan tersebut; 3) golongan-golongan sosial beserta subkulturnya yang merupakan satu identitas kelompoknya; 4) sejarah kesenian dalam berbagai aspek dan dimensinya, serta melacak ikatan kebudayaan sosialnya; 5) sejarah unsur-unsur kebudayaan: sastra, seni tari, seni rupa, arsitektur, dan lain sebagainya; 6) berbagai gaya hidup, antara lain : jenis makanan, mode pakaian, permainan, hiburan, etos kerja, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992: 156).

Pendekatan politik menyoroti struktur kekuasaan dan kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya (Rochmat, 2009: 57) dan

pendekatan filsafat untuk menelaah dan memecahkan masalah yang lebih luas, kompleks dan lebih mendalam, yang tidak terbatas oleh pengalaman inderawi maupun fakta-fakta faktual, yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh sains dengan menggunakan metode filsafat (<http://www.idonbiu.com/2009/05/pendekatan-filosofi-dalam-teori.html> diakses tanggal 1 April 2010)

5. Historiografi

Pada tahap akhir dari penelitian ini ialah historiografi, yaitu merekonstruksi suatu gambaran masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan.

Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab, termasuk pendahuluan sampai kepada penutup serta lampiran-lampiran yang terkait secara logis dan sistematis.

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas latar belakang munculnya SI, perkembangannya hingga dimasuki oleh paham komunis yang menyebabkan timbulnya perpecahan dalam tubuh SI dan tokoh-tokohnya.

Bab ketiga, membahas latar belakang munculnya Gerakan SI-Merah yang merupakan pecahan dari Sarekat Islam (SI), perkembangan pergerakan SI-Merah di Indonesia, mulai dari munculnya hingga berakhirnya gerakan ini beserta tokoh-tokohnya yang secara komprehensif dimulai dari kondisi sosial politik pada tahun 1920-1926.

Bab keempat, merupakan bagian analisis mengenai titik singgung antara Islam dengan komunis yang terjadi pada SI-Merah.

Bab kelima, simpulan yang di dalamnya terdapat saran dan rekomendasi.

BAB II

Sejarah Sarekat Islam

Latar Belakang Munculnya Sarekat Islam

Salah satu fenomena sejarah yang penting diingat dan dicatat di Indonesia adalah gerakan nasionalisme dalam pengertian kemerdekaan politik dan kemandirian ekonomi yang ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam (SI). SI lahir dari Sarekat Dagang Islam (SDI). Mengenai tahun berdirinya Sarekat Dagang Islam, terdapat perbedaan pendapat dari para ahli.

H. Agus Salim, Tamar Djaja, Ridwan Saidi, Anwar Harjono, Ahmad Mansyur Suryanegara, dan Adabi Darban pernah berkata bahwa tahun berdirinya Sarekat Dagang Islam adalah tahun 1905 dan lebih tepat disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan bukan tahun 1908 dengan patokan berdirinya Boedi Oetomo. Karena ruang lingkup Boedi Oetomo hanyalah Pulau Jawa, bahkan hanya etnis Jawa Priyayi pada tahun 1908 itu. Sedangkan Sarekat Dagang Islam mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi inilah yang layak disebut Nasional. Tetapi golongan nasionalis sekuler, sejarawan-sejarawan yang tidak nasionalis, sejarawan-sejarawan “netral”; yang menulis sejarah berdasarkan pesanan mengaburkan hal ini. Golongan nasionalis menyimpangkan fakta bahwa sesungguhnya SDI-lah yang layak disebut nasional, mereka takut dengan hal-hal yang berlabelkan Islam. Asas SDI (Sarekat Dagang Islam) adalah Islam, sedangkan golongan nasionalis sekuler paling takut pada Islam sebagai suatu gerakan. Mereka disebut Islamofobia, meski mereka mengaku beragama Islam. Lalu mengapa Boedi Oetomo yang dijadikan patokan? Karena Boedi Oetomo berdasarkan Nasionalisme Sekuler; atau lebih tepat lagi Nasionalisme Jawa Sekuler! (<http://kebangsaan.org/web> 29 October, 2008).

Petrus Blumberger, seperti yang dikutip Larson (1990: 53), menyatakan bahwa R.M. Tirtoadisoerjo, seorang Solo yang merantau dan redaktur majalah Medan Prijaji, pernah mendirikan Sarekat Dagang Islamiah di Batavia pada tahun 1909 dan Sarekat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1911. Awal 1912 ia secara resmi membentuk Sarekat Dagang Islam di Surakarta sebagai cabang dari Bogor. Namun berdasarkan Laporan Van Wijk kepada GG (*Gouverneur Generaal*) (Larson, 1990: 53), ia cepat menghilang dan Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik yang terkemuka di Laweyan, tampil sebagai pemimpin yang sebenarnya.

Belanda melakukan politik *Divide et Impera* atau "pecah belah" pada pedagang pribumi dan Cina dengan mencetuskan huru-hara Anti-Cina dan memberikan hak monopoli batik kepada pedagang Cina, sehingga hubungan sosial ekonomi keduanya memburuk (Suryanegara, 2009: 359). Deliar Noer (1996: 115) berpendapat bahwa kelahiran SDI diawali oleh dua sebab. *Pertama*, kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik terutama dengan golongan Cina, dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia. *Kedua*, tekanan yang dirasakan masyarakat Indonesia di Solo saat itu dari kalangan bangsawan mereka sendiri. SDI dimaksudkan menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya terdiri dari pedagang-pedagang batik di Solo terhadap orang-orang Cina dan para bangsawan tadi. Nampak bahwa alasan-alasan utama berdirinya SDI adalah alasan ekonomis dan etnosentris.

SDI didirikan dengan maksud untuk memajukan perdagangan di bawah panji-panji Islam, SDI juga memiliki tujuan seperti yang terumus dalam anggaran dasarnya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan jiwa berdagang,
- b. Memberi bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran,
- c. Memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat Bangsa Bumi Putra, dan

d. Menggalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan Agama Islam (Noer, 1996: 116-117).

Ruang lingkup keanggotaan SDI terbatas (hanya pedagang yang beragama Islam). Itu merupakan penghalang bagi upaya SDI untuk menjangkau keanggotaan yang lebih luas. Oleh karena itu, ada keinginan agar SDI menjelma menjadi organisasi massa. Untuk itu, terjadi perubahan nama dari SDI menjadi SI (Sarekat Islam). Penghilangan kata 'dagang' memberikan arti yang besar bagi perkembangan SI, terutama dalam hal keanggotaan. Dengan perubahan itu, Sarekat Islam menjadi organisasi yang terbuka sehingga memungkinkan untuk menjangkau keanggotaan yang lebih banyak karena Islam menjadi identitas pribumi. Sehingga pada tahun 1919 SI menjadi gerakan massa dengan anggotanya mencapai 2 juta orang.

Fred Robert von der Mehden dan Robert van Neil, seperti yang dikutip oleh Deliar Noer, menyatakan bahwa perubahan nama SDI menjadi SI terjadi setelah H.O.S. Cokroaminoto masuk dalam organisasi ini pada tahun 1912 atas undangan H. Samanhudi (Noer, 1996: 117). Di tangan H.O.S. Cokroaminoto, SI berhasil menjadi sebuah organisasi sosial, ekonomi, politik yang menyebar nyaris ke seluruh penjuru Nusantara. Sarekat Islam berkembang dengan pesat karena Agama Islam menjadi motivasinya dan tidak hanya mengedepankan nilai-nilai Islam, namun juga semangat ideologi kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, faktor penyebab munculnya Sarekat Islam terbagi dalam dua faktor, yaitu: faktor intern dan ekstern

1. Faktor Intern

a. Konflik antara pedagang Cina dan Jawa dalam perdagangan batik (Noer, 1996: 116)

Pada masa itu sektor ekonomi, khususnya perdagangan batik, dikuasai oleh para pedagang Cina. Menurut Furnivall dan Van Niel hal ini meresahkan masyarakat, terutama masyarakat Jawa (Larson, 1990: 55). Meski dilatarbelakangi persaingan dalam

perdagangan batik, Korver (1985: 18-19) memiliki pendapat lain. Menurutnya alasan yang mungkin bisa menyebabkan konflik antara Cina dan Jawa bukanlah motif ekonomis tetapi lebih kepada sosial dan politis. Senada dengan Korver, Sitorus (1988: 19) menyatakan bahwa yang menjadi pemicu persaingan ini adalah hal-hal yang lebih bersifat sosial daripada ekonomi. Jadi, meskipun pedagang Cina yang datang saat itu bertujuan untuk berdagang batik di Indonesia, namun mereka juga mencoba menguasai kehidupan sosial masyarakat. Hal inilah yang mendorong masyarakat Jawa untuk melawan dan mengusir bangsa Cina dengan terbentuknya SDI (Sarekat Dagang Islam) yang kemudian berubah menjadi SI (Sarekat Islam).

b. Reaksi terhadap rencana kristenisasi dari kaum Zending

Menurut Djoened (1984: 183) kaum Zending¹ melancarkan *krestening politiek* (politik peng-kristenan) pada masyarakat. Hal ini sangat mencemaskan, karena sangat membahayakan bagi umat Islam, sehingga diperlukan suatu wadah yang menjadi kesatuan bagi masyarakat Islam, faktor ini mendukung munculnya Sarekat Islam.

c. Kecurangan dan penindasan dari *ambtenaar-ambtenaar*² Bumiputera dan Eropa (Noer, 1996: 116)

Para *ambtenaar* yang notabene adalah pribumi, bahkan masih ada yang beragama Islam, melakukan kecurangan-kecurangan serta penindasan terhadap rakyat. Hal ini pertentangan dengan rasa kemanusiaan dan kebangsaan, sehingga menimbulkan kebencian pada rakyat. Oleh karena itu, masyarakat mencoba mencari cara yang tepat

¹ Zending berasal dari kata bahasa Belanda yang artinya pengutusan. Kegiatan zending umumnya dipakai untuk kalangan Kristen Protestan, sedangkan untuk Kristen Katolik dipakai kata missi. Zending ditujukan untuk penyebaran agama Kristen (<http://id.wikipedia.org/wiki/Zending> diakses tanggal 21 April 2010).

² Ambtenaar adalah seorang pejabat [terdaftar] pribumi yang terlibat dalam berhubungan publik untuk sebagian tugas umum yang berada di bawah otoritas yang lebih tinggi. Pejabat bisa bekerja dengan pemerintah (Belanda), sebuah provinsi, sebuah kotamadya, atau di lembaga-lembaga yang dikelola oleh Negara atau badan-badan publik. Oleh karena itu juga disebut sebagai pegawai negeri sipil, pejabat federal, pejabat masyarakat, pejabat provinsi, pejabat kota air, pejabat dewan, pejabat pendidikan, polisi dan sebagainya. Karyawan lembaga milik negara sering dikatakan sebagai pejabat (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambtenaar> diakses tanggal 21 April 2010).

untuk menghentikan hal itu dan salah satu caranya adalah dengan mendirikan organisasi Sarekat Islam.

d. Respon dari kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda.

Belanda memberlakukan *Etische Politiek* (Politik Etis) dengan triloginya: *Educatie* (Edukasi), *Irigatie* (Irigasi) dan *Emigratie* (Emigrasi). Trilogi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan penjajahannya. Mereka beranggapan bahwa bila Indonesia merdeka, segalanya akan hilang (Suryanegara, 2009: 302).

Politik Etis dengan edukasinya, adalah sistem pendidikan imperialis. Tujuannya jelas adalah merendahkan derajat kaum muslim generasi muda pribumi. Demikian pula pelaksanaan irigasi, sebagai bagian kedua dari trilogi Politik Etis. Irigasi bukanlah untuk meningkatkan pengairan sawah dan lading milik petani muslim yang sangat berjasa membangun kerajaan Protestan Belanda, dari keuntungan Tanam Paksa, melainkan membangun sistem pengairan untuk melayani kebutuhan perkebunan dan pertambangan dari modal asing. Dalam pelaksanaan trilogi ketiga dari Politik Etis, emigrasi atau pemindahan tenaga kerja terkait pula dengan upaya memperlemah kedudukan Ulama dan Santri. Dengan dipindahkannya masyarakat pendukung, para ulama pun akan kehilangan basisnya (Suryanegara, 2009: 307-308). Melihat situasi ini, maka muncullah Sarekat Islam sebagai respon atas kebijakan Politik Etis Belanda yang ingin menghilangkan peran ulama yang mampu menumbuhkan nasionalisme dalam masyarakat.

e. Keinginan untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia

H.O.S. Cokroaminoto menegaskan bahwa tujuan didirikannya Sarekat Islam adalah untuk membangun kebangsaan, mencari hak-hak kemanusiaan yang memang sudah tercetak oleh Tuhan, menjunjung derajat yang masih rendah, memperbaiki nasib yang masih jelek dengan jalan mencari tambahan kekayaan (Sitorus, 1988: 21). Ini menunjukkan bahwa berdirinya Sarekat Islam adalah untuk bangsa Indonesia sendiri.

2. Faktor Ekstern

Kemunculan Sarekat Islam juga dipengaruhi adanya faktor-faktor dari luar, antara lain:

a. Revolusi Cina³

Pada tanggal 10 Oktober 1911 terjadi Revolusi Cina yang diprakarsai Sun Yat Sen, yang berhasil meruntuhkan dominasi dinasti monarki absolut Cina, dan mendirikan Cina baru yang berasaskan nasionalisme dan demokrasi (Sitorus, 1988: 17). Revolusi ini menumbuhkan harga diri yang tinggi dan memberikan pelajaran bagi bangsa Indonesia akan pentingnya membangun semangat kebangsaan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat yang dijajah Belanda.

b. Peningkatan hubungan dengan Arab

Hubungan yang meningkat dengan bangsa Arab membuat pengetahuan akan agama Islam pun semakin berkembang. Para ulama, santri, serta putera-putera Indonesia yang mendapat pendidikan dari Belanda dan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, telah melahirkan gagasan di kalangan pejuang muslim untuk membentuk organisasi kemasyarakatan yang bermotif pergerakan dengan mengambil ciri Islam (Pringgodigdo, 1994: 19).

Faktor-faktor intern dan ekstern yang menyebabkan berdirinya Sarekat Islam di atas, adalah upaya dari bangsa Indonesia untuk memperjuangkan rasa keadilan dan memperbaiki nasib rakyat dari penindasan atas penjajahan Belanda. Pelajaran penting yang disajikan sejarah yang kini diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional adalah kehebatan para elite negeri ini dalam merespon perubahan.

³Sun Yat Sen sebelumnya telah melakukan revolusi sekitar 11 kali sebelum akhirnya berhasil menegakkan pemerintahan Republik Cina pada 10 Oktober 1911 dan meruntuhkan dinasti monarki absolute Cina. Bahkan L. Stoddard menyatakan bahwa Sun Yat Sen sangat berterima kasih kepada Cina Islam yang ikut serta mensukseskan revolusinya. Dengan kata lain, Sun Yat Sen mengakui bantuan dan kerja sama Cina Islam dalam revolusi tersebut. Revolusi ini dengan mudah menyebar ke Indonesia dan dampaknya pasti akan membangkitkan kembali jiwa juang ulama untuk meruntuhkan penjajahan di Indonesia (Suryanegara, 2009: 358).

Perkembangan Sarekat Islam

Perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan organisasi. Penghilangan kata “Dagang” menyebabkan keanggotaan organisasi lebih terbuka, yang semula hanya untuk komunitas pedagang dan terbatas pada bidang ekonomi saja, menjadi terbuka untuk masyarakat umum serta menyentuh aspek-aspek kehidupan selain ekonomi. Dengan perubahan itu, Sarekat Islam menjadi organisasi yang terbuka sehingga memungkinkan untuk menjangkau keanggotaan yang lebih banyak karena Islam menjadi identitas pribumi. Dengan segera, Sarekat Islam menjadi gerakan massa dengan anggotanya mencapai 2 juta orang pada tahun 1919.

Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam empat bagian (Noer, 1996: 114), yaitu: periode pertama (1911-1916) yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut; periode kedua (1916-1921) yang merupakan periode puncak; periode ketiga (1921-1927) adalah periode konsolidasi yang juga bersaing keras dengan golongan komunis dan tekanan-tekanan dari pemerintah Belanda; dan periode keempat (1927-1942) yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia.

1. Periode Pertama (1911-1916)

Sarekat Islam berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912 yang bermula dari organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam. Periode pertama ini (Noer, 1996: 116) ditandai oleh perhatian terhadap masalah-masalah organisasi, termasuk di dalamnya usaha mencari pimpinan, penyusun Anggaran Dasar dan hubungan antara organisasi pusat dengan organisasi daerah. Ketiga masalah ini dapat diselesaikan sehingga Sarekat Islam berjalan dengan lancar sampai mencapai puncaknya pada tahun 1916 sampai 1921.

Anggaran Dasar pertama bertanggal 11 November 1911 dirumuskan oleh RM. Tirtoadisuryo, yang pada masa itu termasuk salah seorang dari sejumlah orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan yang lumayan. Ia adalah lulusan dari OSVIA, sebuah sekolah administrasi pemerintah Belanda. Aktif dalam pers dengan menerbitkan majalah Medan Prijaji di Bogor dan juga mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor tahun 1911 (Noer, 1996: 116).

Sarekat Islam berkembang cepat ke daerah-daerah lain di Jawa, namun Residen Surakarta membekukan organisasi ini setelah kegiatan-kegiatan para anggotanya di Solo meningkat tanpa dapat diawasi oleh penguasa setempat. Perkelahian yang terjadi secara terus menerus dengan golongan Cina dan pemogokan para pekerja perkebunan Krapyak di Mangkunegaran pada awal Agustus 1912 memicu pembekuan ini (Noer, 1996: 117). Para penguasa berpendapat kerusuhan-kerusuhan tersebut disebabkan oleh Sarekat Islam. Kemudian pembekuan ini dicabut kembali pada tanggal 26 Agustus 1912 dengan syarat agar Anggaran Dasarnya diubah sedemikian rupa, sehingga hanya terbatas pada daerah Surakarta saja. Syarat lain juga diajukan (Amelz, 1952: 92), yaitu adanya pengawasan terhadap keuangan organisasi yang harus dilakukan secara memuaskan.

Sarekat Islam kemudian memperoleh seorang tokoh yang diharapkan dapat memimpin organisasi tersebut melalui awal tahun yang penuh kesulitan itu, yaitu Haji Oemar Said Cokroaminoto yang bergabung dengan Sarekat Islam di Surabaya pada bulan Mei 1912 atas ajakan H. Samanhudi yang memang mencari orang-orang yang pernah mendapat pendidikan yang lebih baik dan yang lebih berpengalaman untuk memperkuat organisasinya. Tanpa memperhatikan persyaratan Residen Surakarta, H.O.S. Cokroaminoto menyusun sebuah Anggaran Dasar baru untuk Sarekat Islam bagi seluruh Indonesia dan meminta pengakuan dari pemerintah untuk menghindarkan diri dari pengawasan preventif dan represif secara administratif (Noer, 1996: 118). Dengan

berbagai alasan, permintaan ini ditolak pemerintah Belanda namun permintaan dari organisasi lokal yang mempunyai sifat yang sama akan dipertimbangkan sebaik-baiknya. Akibatnya cabang-cabang Sarekat Islam lokal yang memenuhi persyaratan mengajukan permintaan pengakuan secara setempat yang pada umumnya diberikan oleh pemerintah.

Langkah H.O.S. Cokroaminoto untuk mendapat status badan hukum bagi Sarekat Islam, dipandang oleh Korver sebagai langkah politik yang jitu dan berwawasan ke depan (Korver, 1985: 30). Dengan pengakuan itu, Sarekat Islam akan memperoleh berbagai keuntungan politis, yaitu: *Pertama*, Sarekat Islam akan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum perdata. *Kedua*, pengakuan badan hukum dianggap sebagai persetujuan resmi pemerintah terhadap Sarekat Islam. Banyak pegawai rendah Indonesia yang bersimpati dengan Sarekat Islam tidak berani masuk organisasi tersebut karena takut ditindak oleh atasan. Dengan adanya pengakuan pemerintah, mereka leluasa untuk masuk ke organisasi. *Ketiga*, sulit bagi suatu organisasi yang tidak diakui untuk mengadakan rapat. Peraturan Kepolisian Umum untuk Hindia Belanda menetapkan bahwa rapat yang diadakan oleh organisasi yang tidak diakui sebagai badan hukum memerlukan izin tertulis sebelumnya dari penguasa setempat. Sementara izin tertulis tidak diperlukan bagi organisasi yang diakui secara resmi. Dalam prakteknya, ketentuan ini berarti larangan mengadakan rapat bagi organisasi yang tidak diakui.

Keputusan pemerintah Belanda tersebut mengganggu struktur organisasi dari Sarekat Islam yang menurut kongres pertamanya di Surabaya pada bulan Januari 1913 memang menekankan pada kegiatan yang bersifat menyeluruh untuk seluruh pelosok di Indonesia. Kongres ini pun membagi wilayah organisasi menjadi tiga bagian ((Noer, 1996: 118-119), yaitu Jawa Barat (yang meliputi Jawa Barat, Sumatera dan pulau-pulau sekitar Sumatera), Jawa Tengah (yang meliputi Kalimantan) dan Jawa Timur (yang meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau lain di Indonesia Timur.

Ketiga wilayah ini serta cabang-cabang Sarekat Islam berada di bawah pengawasan pengurus pusat di Surakarta yang diketuai oleh H. Samanhudi.

Agar permasalahan pengakuan ini tuntas, pemimpin-pemimpin Sarekat Islam memenuhi persyaratan yang dikemukakan pemerintah, tetapi juga dengan mengusahakan kerjasama yang erat antara cabang-cabang Sarekat Islam setempat (SI lokal). Sarekat Islam baru diresmikan dengan akte notaris pada tanggal 10 September 1912 dengan berkedudukan di Solo. Organisasi ini meletakkan dasar perjuangannya atas tiga prinsip dasar (Gani, 1984: 14), yaitu:

a. Asas Islam sebagai dasar perjuangan

H.O.S Cokroaminoto menyatakan bahwa Sarekat Islam memakai nama agama sebagai ikatan persatuan bangsa, untuk mencapai cita-cita sebenarnya, dan agama tidak akan menghambat tujuan dalam pencapaian cita-cita tersebut (Hanifah, 1978: 22). Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh upaya Belanda untuk melenyapkan agama Islam yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan penjajahan. Belanda menganggap jika Islam tidak dapat dilenyapkan, setidaknya dihambat perkembangannya dan jangan sampai Islam digunakan sebagai alat politik.

Hal ini didukung oleh Amelz (1952: 79) yang menyatakan bahwa Belanda dalam mencapai tujuan penjajahannya, agama itu pengertian yang mati, menjadi falsafah yang hanya hidup dalam khayal, dan menjadi sebutan bibir belaka. Islam hendak dijadikan tinggal hurufnya saja dan tiada jiwanya lagi. Dengan demikian, Belanda memperbolehkan masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, tetapi hanya sampai pada kepercayaan di hati saja dan alat menyembah Tuhan di dalam masjid dan surau, agar Islam jangan sampai dijadikan sebagai alat dalam hidup dan perjuangan, apalagi sebagai dasar perjuangan untuk menentang kolonialisme.

Penggunaan Islam sebagai dasar pertama dalam Sarekat Islam sengaja dilakukan oleh para pemimpin Sarekat Islam. Mereka menyadari bahwa Islam

merupakan kekuatan, karena dengan berlandaskan agama inilah dapat menimbulkan kekuatan yang besar dalam diri umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus dihimpun dalam satu wadah demi memelihara harkat dan martabat untuk membebaskan diri dari penindasan kolonialisme.

b. Asas Kerakyatan sebagai dasar himpunan

Bangsa Cina turut “menjajah” bangsa Indonesia walaupun tidak secara terang-terangan. Cina memegang monopoli perdagangan hampir dalam seluruh sektor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini terjadi karena Belanda memberikan hak-hak istimewa dan perlakuan istimewa kepada etnis Cina sebagai warga negara yang setingkat lebih tinggi dari penduduk pribumi. Bahkan Belanda membagi penduduk dalam tiga golongan besar, yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan pribumi (Gani, 1984: 19). Penggolongan ini diperkuat oleh Hanifah (1978: 8) yang mengungkapkan masyarakat dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas satu adalah Belanda atau kulit putih, kelas dua adalah indo belanda beserta Cina, Arab dan India yang dinamakan *Vreem de oosterlingen*, serta anak-anak pribumi sebagai kelas tiga atau *inlanders*.

Penggolongan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedudukan lebih rendah, bahkan menjadi budak dalam sistem *culture stelsel* atau tanam paksa, yang mengharuskan rakyat menanam jenis tanaman seperti tebu, kopi dan karet. Penanaman ini menghasilkan keuntungan devisa yang besar bagi Belanda. Menurut Wertheim, seperti yang dikutip oleh Gani (1984: 21), bangsa Indonesia memang sengaja dijadikan lumbung bahan-bahan mentah untuk Eropa dan Amerika Serikat karena murah tenaga buruh. Kenyataan ini menjadikan asas kerakyatan sebagai salah satu dasar dalam perjuangan Sarekat Islam untuk rakyat miskin dan sengsara

c. Asas Sosial Ekonomi sebagai usaha peningkatan kesejahteraan rakyat

Kondisi kemiskinan rakyat dan kekuasaan penjajah, khususnya Cina yang menguasai perdagangan bangsa saat itu, mendorong para pemimpin Sarekat Islam

mengeluarkan satu kesimpulan bahwa menghadapi kelompok Cina tidak mungkin hanya dihadapi oleh pengusaha-pengusaha pribumi saja. Seluruh potensi manusia, khususnya umat Islam diarahkan dalam usaha mempertahankan hak dan martabat bangsa Indonesia (Jaya, 1974: 18). Hal inilah yang menyebabkan sosial ekonomi menjadi asas perjuangan Sarekat Islam.

Ketiga asas di atas (Islam, kerakyatan dan sosial ekonomi) menjadi dasar perjuangan Sarekat Islam untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia bangkit dan berjuang melawan kolonialisme.

Sementara tujuan dari Sarekat Islam dalam akte notaris Sarekat Islam tertanggal 10 September 1912 yang memuat *statuten*, (Tirtoprodjo, 1968: 24), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memajukan perdagangan
- b. Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesulitan melalui koperasi
- c. Memajukan kepentingan pendidikan jasmani dan rohani penduduk pribumi
- d. Memajukan kehidupan agama Islam.

Tujuan-tujuan di atas memperlihatkan bahwa Sarekat Islam tetap memperhatikan bidang ekonomi, pendidikan dan dakwah Islam dalam masyarakat. Jika tujuan-tujuan tersebut berkembang, maka akan turut mempengaruhi perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perjuangan Sarekat Islam pada periode pertama menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain:

- a. Aspek Politik

Pada awal berdirinya Sarekat Islam mengarah pada bidang perdagangan. Seiring dengan berbagai perubahan dan perkembangan politik pada saat itu, Sarekat Islam mulai melirik bidang perpolitikan. Untuk menyebarkan propaganda

perjuangannya, Sarekat Islam menerbitkan surat kabar yang bernama Utusan Hindia. Langkah selanjutnya meminta pengakuan pemerintah Belanda terhadap organisasi Sarekat Islam.

Langkah H.O.S. Cokroaminoto untuk mendapat status badan hukum bagi Sarekat Islam, dipandang oleh Korver sebagai langkah politik yang jitu dan berwawasan ke depan (Korver, 1985: 30). Dengan pengakuan itu, Sarekat Islam akan memperoleh berbagai keuntungan politis, yaitu: *pertama*, Sarekat Islam akan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum perdata. *Kedua*, pengakuan badan hukum dianggap sebagai persetujuan resmi pemerintah terhadap Sarekat Islam. Banyak pegawai rendah Indonesia yang bersimpati dengan Sarekat Islam tidak berani masuk organisasi tersebut karena takut ditindak oleh atasan. Dengan adanya pengakuan pemerintah, mereka leluasa untuk masuk ke organisasi. *Ketiga*, sulit bagi suatu organisasi yang tidak diakui untuk mengadakan rapat. Peraturan Kepolisian Umum untuk Hindia Belanda menetapkan bahwa rapat yang diadakan oleh organisasi yang tidak diakui sebagai badan hukum memerlukan izin tertulis sebelumnya dari penguasa setempat. Sementara izin tertulis tidak diperlukan bagi organisasi yang diakui secara resmi. Dalam prakteknya, ketentuan ini berarti larangan mengadakan rapat bagi organisasi yang tidak diakui.

b. Aspek Dakwah

Sejak awal berdiri, Sarekat Islam telah mengarahkan gerakannya kepada dakwah (Reid & Gilsenan, 2007: 112). Meskipun dakwah yang dilakukan tidak diatur secara intensif, tetapi programnya lebih ditekankan kepada pelaksanaan yang bersifat insidental sesuai dengan keperluan lingkungan, terutama di hari-hari besar Islam.

c. Aspek Ekonomi

Pada masa penjajahan Belanda, ekonomi bangsa Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi saat itu perekonomian dan perdagangan bangsa Indonesia diatur oleh bangsa asing, yakni Belanda dan Cina. Upaya perbaikan dan pengembangan

bidang ekonomi ini dituangkan dalam perjuangan Sarekat Islam. H.O.S. Cokroaminoto menyatakan bahwa Sarekat Islam tidak bertujuan politik, tetapi menghidupkan jiwa dagang dari bangsa Indonesia, memperkuat ekonominya agar dapat menghadapi bangsa asing dengan mendirikan koperasi (Amin, 1995: 81). Basis ekonomi yang kuat merupakan modal dasar dalam perombakan sosial dan politik. Di samping itu, orientasi ekonomi ini merupakan strategi Sarekat Islam yang dimotori H. Samanhudi dan H.O.S. Cokroaminoto dalam mensiasati kondisi politik kolonial yang tidak membolehkan berdirinya organisasi yang berlandaskan politik sampai tahun 1915.

Usaha-usaha perekonomian yang dibangun Sarekat Islam bertujuan menentang kapitalisme yang telah menggerogoti kekayaan bangsa. Dalam upaya menandingi kekuatan kapitalis, maka dibentuklah beberapa ikatan kaum buruh, antara lain Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) yang didirikan tahun 1916 dan perkumpulan *Vereniging Inheems Personeel B.O.W.* (V.I.P.B.O.W) serta P.B. *Chauffeurs Bond* atau perkumpulan para supir seluruh Jawa. Serikat-serikat buruh ini didirikan untuk memacu kesejahteraan ekonomi para buruh dan memperkuat posisi tawar-menawar (*bargaining position*) terhadap majikannya (Amelz, 1952: 112). Upaya yang ditempuh Sarekat Islam ini merupakan pelaksanaan dari pencapaian cita-cita yakni peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

d. Aspek Sosial

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat mendapatkan status sosial yang sangat rendah. Tidak hanya itu, tradisi-tradisi lama yang bertentangan dengan ajaran Islam juga menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Tradisi-tradisi lama tersebut terkait dengan perbuatan-perbuatan amoral seperti berjudi, minum-minuman keras, mencuri dan lain sebagainya. Kondisi ini merendahkan kehidupan masyarakat, sehingga mendorong Sarekat Islam untuk memberantas penyakit sosial tersebut dengan

melancarkan kampanye membasmi “tujuh M”, yaitu main judi, *madon* (nafsu seks), minum (mabok), *madat* (candu), *mangan* (makan berlebihan), *maling* (mencuri) dan *misub* (memaki) (Korver, 1985: 51-52).

Sarekat Islam juga mencoba memberantas adat feodal Jawa yang merendahkan martabat manusia. Adat memberi hormat dengan berjongkok dan mencium kaki para pembesar Jawa dikritik dan diberantas. Bahkan menurut Amin (1995: 90), Sarekat Islam mencanangkan gerakan “*Djawa Dwipa*”. Gerakan ini memberikan instruksi kepada para anggotanya untuk tidak menggunakan bahasa Jawa Kromo, yaitu bahasa yang dipergunakan oleh rakyat jelata terhadap kaum ningrat.

e. Aspek Pendidikan

Status sosial yang rendah akibat penggolongan kelas masyarakat yang dilakukan Belanda, mempengaruhi kesempatan bagi masyarakat pribumi dalam mengenyam pendidikan. Korver (1985: 99) menyatakan bahwa dalam kalangan Sarekat Islam yang berasal dari keturunan Arab telah mengembangkan pola pendidikan dalam *Djamiat Chair* yang akan diusahakan sebagai sekolah-sekolah percontohan bagi Sarekat Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sarekat Islam mendirikan banyak sekolah dengan sistem pendidikan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara menuntut ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama Islam. Selain itu, pendidikan juga harus dapat mempertebal rasa kebangsaan.

Pada kongres kedua Sarekat Islam di Surakarta tanggal 23 Maret 1913, pembagian wilayah organisasi –yang pada kongres pertama dibagi menjadi tiga bagian (Noer, 1996: 118-119), yaitu Jawa Barat (yang meliputi Jawa Barat, Sumatera dan pulau-pulau sekitar Sumatera), Jawa Tengah (yang meliputi Kalimantan) dan Jawa Timur (yang meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau lain di Indonesia Timur– dihapuskan. Dan dalam suatu pertemuan di Yogyakarta pada tanggal

18 Februari 1914 para pemimpin Sarekat Islam memutuskan untuk membentuk suatu pengurus pusat yang dinamakan Centraal Sarekat Islam (CSI), yang terdiri dari H. Samanhudi sebagai Ketua Kehormatan, H.O.S. Cokroaminoto sebagai Ketua dan Gunawan sebagai Wakil Ketua. Kepengurusan CSI ini baru diakui pemerintah tanggal 18 Maret 1916 (Noer, 1996: 119).

Pada periode pertama yang dimulai pada tahun 1911, Sarekat Islam dipimpin oleh H. Samanhudi, yang menurut Deliar Noer (1996: 119), adalah seseorang yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup, sehingga organisasi bersifat lepas. Kepemimpinannya tidak sampai dirasakan oleh kalangan anggota dan walaupun tujuan-tujuannya amat tinggi, organisasi ini tidak dapat memperluas kegiatannya, yang hanya terbatas dalam hal yang berkenaan langsung dengan tantangan yang dikemukakan pihak Cina dan bangsawan. Tetapi mulai tahun 1912 ketika Sarekat Islam dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto yang seakan-akan bermimpi untuk menghapuskan segala penderitaan rakyat –suatu pemikiran yang dicoba untuk direalisasikan oleh Sarekat Islam setelah tahun 1915– berhasil memberi bentuk yang jelas tentang struktur organisasi, suatu hal yang dalam masa periode pertama telah menghabiskan segenap perhatiannya serta perhatian pemimpin-pemimpin Sarekat Islam yang lain.

2. Periode kedua (1916-1921)

Struktur organisasi Sarekat Islam telah stabil pada periode pertama, sehingga pada periode kedua ini Sarekat Islam memberikan perhatian pada berbagai masalah, baik politik maupun agama. Sifat politiknya terlihat dengan jelas pada nama dari kongres-kongres tahunannya (Noer, 1996: 126). Dalam periode pertama, pertemuan-pertemuan tahunan ini disebutkan kongres saja, sedangkan dalam periode kedua, kongres-kongres tersebut disebutkan kongres nasional. Hal ini tidak sekedar mencerminkan bahwa Sarekat Islam telah tersebar di seluruh Indonesia dan kongresnya diikuti utusan-utusan dari seluruh daerah, tetapi juga mencerminkan usaha yang sadar

dari para pemimpinnya untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita nasionalisme, dengan Islam sebagai ajaran yang dianggap sebagai dasar dalam pemikiran tersebut.

Pemakaian kata "nasional" dijelaskan H.O.S. Cokroaminoto sebagai suatu usaha untuk meningkatkan seseorang pada tingkat *natie* (bangsa), yang merupakan usaha pertama untuk berjuang menuntut pemerintahan sendiri atau sekurang-kurangnya agar orang-orang Indonesia diberikan hak untuk mengemukakan suaranya dalam masalah-masalah politik. Abdul Muis menghubungkan hal ini dengan perjuangan kemerdekaan. Dalam *Harian Neratja* tertanggal 22 Oktober 1917, seperti yang dikutip Deliar Noer (1996: 126), ia mengatakan bahwa hanya dengan dasar nasionalisme-lah kemerdekaan suatu bangsa dapat dicapai dengan cepat.

Secara spesifik Cokroaminoto mendudukan hubungan Indonesia dengan Belanda sebagaimana seharusnya. Pada kongres nasional pertama di Bandung tahun 1916, seperti yang dikutip Deliar Noer (1996: 126-127) dalam naskah *Sarekat Islam Congres (2e Nationaal Congres)*, ia berkata:

"Tidaklah wajar melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya, dan pada saat ini, tidaklah dapat lagi dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik, yang menyangkut nasibnya sendiri..... Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa partisipasi kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita".

Sifat politik dari organisasi ini dirumuskan dalam "Keterangan Pokok" (asas) dan Program Kerja yang disetujui oleh kongres nasional yang kedua dalam tahun 1917. Asas ini mengemukakan kepercayaan Centraal Sarekat Islam bahwa "agama Islam itu membuka rasa pikiran perihal persamaan derajat manusia sambil menjunjung tinggi kepada kuasa negeri" dan bahwa "Islam sebaik-baiknya agama untuk mendidik budi pekerti rakyat". Organisasi juga memandang "agama sebagai sebaik-baiknya upaya yang boleh dipergunakan agar jalannya budi akal setiap orang itu selaras dengan budi

pekerti”. Negeri atau pemerintah ”hendaklah tidak terkena pengaruhnya dengan percampuran suatu agama, melainkan hendaklah melakukan penilaian di atas semua agama itu”. Centraal Sarekat Islam pun ”tidak mengakui suatu golongan rakyat (penduduk) berkuasa di atas golongan rakyat (penduduk) yang lain”. Ia ”mengharap hancurnya kuasa satu kapitalisme yang jahat (*Zondig kapitalisme*), dan memperjuangkan agar ”tambah pengaruhnya segala rakyat dan golongan rakyat, di atas jalannya pemerintahan dan kuasanya pemerintah yang pada akhirnya akan boleh mendapat kuasa pemerintah sendiri (*zelfbesture*)” (Noer, 1996: 127). Dalam mencapai maksud dan tujuan ini, Centraal Sarekat Islam mencari kerjasama dan saling membantu dengan pihak-pihak yang menyetujuinya.

Program kerja dibagi atas delapan bagian (Noer, 1996: 127-129), yaitu bagian *Pertama*, mengenai politik, di mana Sarekat Islam menuntut berdirinya dewan-dewan daerah, perluasan hak-hak *Volksraad* (Dewan Rakyat) dengan tujuan untuk mentransformasikannya menjadi suatu lembaga perwakilan yang sesungguhnya untuk keperluan legislatif. Hak pilih dalam hal dewan desa haruslah diberikan kepada orang dewasa yang telah berumur 21 tahun ke atas, yang dapat membaca dan menulis dalam bahasa apapun juga dan mengerti secukupnya bahasa Melayu. Agar segala hak-hak politik ini dapat berfungsi dengan wajar, Sarekat Islam menuntut penghapusan kerja paksa dan sistem izin untuk bepergian.

Kedua, dalam bidang pendidikan, Sarekat Islam menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasikan penerimaan murid di sekolah-sekolah. Organisasi juga menuntut terlaksananya wajib belajar untuk semua penduduk sampai berumur 15 tahun, perbaikan lembaga-lembaga pendidikan pada segala tingkat, bertambahnya jumlah sekolah, memasukkan pelajaran ketrampilan, perluasan sekolah hukum dan sekolah kedokteran menjadi universitas dan pemberian beasiswa kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar di luar negeri.

Ketiga, dalam bidang agama, menuntut dihapuskannya segala macam undang-undang dan peraturan yang menghambat tersebarnya Islam, pembayaran gaji bagi kyai dan penghulu, subsidi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pengakuan hari-hari besar Islam.

Keempat, dalam bidang keadilan dan hukum yang sering dipermasalahkan antara pihak pemerintah dan yang diperintah dalam suatu negeri jajahan. Sarekat Islam menuntut adanya pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif, dan menganggap perlu dibangun suatu hukum yang sama demi menegakkan hak-hak yang sama di antara golongan penduduk negeri. Dan juga menuntut kemudahan bagi penduduk miskin untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kelima, Sarekat Islam menuntut perbaikan dalam bidang agraria dan pertanian dengan menghapuskan *particuliere landerijen* (milik tuan tanah), dan dengan mengadakan ekspansi serta perbaikan irigasi. Tuntutan lain adalah agar industri-industri yang sangat penting dinasionalisasi yaitu industri-industri yang mempunyai sifat monopoli dan yang memenuhi kebutuhan bagi rakyat banyak. Termasuk perusahaan tekstil, kertas dan industri-industri lain yang menghasilkan barang besi, peralatan hubungan dan gas, air serta listrik.

Keenam, dalam bidang keuangan dan perpajakan, Sarekat Islam menuntut adanya pajak-pajak secara proporsional serta pajak-pajak yang dipungut terhadap laba perkebunan.

Ketujuh, dalam hal koperasi, pemerintah dituntut untuk memberikan bantuan bagi perkumpulan koperasi. Dan *kedelapan*, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah dituntut agar mengeluarkan peraturan perburuhan yang menjaga kepentingan para pekerja, menambah jumlah poliklinik gratis bagi pekerja, melarang penggunaan tenaga anak-anak, dan memerangi minuman keras, candu, perjudian serta prostitusi.

Program kerja ini diperinci lagi dalam mosi-mosi dalam kongres tahun 1917 yang juga membahas masalah *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang akan didirikan tahun berikutnya. Sebelumnya terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu atau tidaknya partisipasi Sarekat Islam dalam *Volksraad*. Pada kongres tahun 1916, Abdul Muis mengemukakan bahwa partisipasi seperti itu akan memungkinkan bagi organisasi untuk mengemukakan pandangannya tentang berbagai masalah dan untuk membela hak-hak rakyat walaupun ia mengakui bahwa ia sendiri tidak sepenuhnya puas dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki *Volksraad*. Saat itu ia melihat *Volksraad* sebagai suatu langkah untuk mendirikan dewan perwakilan yang sebenarnya. Dan pada kongres tahun 1917 ia mengulang kembali argumentasi ini (Noer, 1996: 129).

Sebaliknya Semaun, seorang pemimpin Sarekat Islam –yang kemudian menjadi seorang komunis– mengatakan bahwa *Volksraad* hanyalah suatu ”pertunjukan kosong, suatu akal dari kaum kapitalis mengelabui mata rakyat jelata untuk memperoleh untung lebih banyak”. Akan tetapi Sarekat Islam lebih menyetujui pendapat Muis dan memutuskan berpartisipasi dalam *Volksraad*.

Masalah partisipasi ini muncul kembali dengan adanya penunjukan dari pemerintah untuk mengangkat Cokroaminoto dalam *Volksraad* tersebut pada tanggal 23 Februari 1918. Para pemimpin Sarekat Islam meminta persetujuan pada cabang-cabang Sarekat Islam lokal di Jawa. R. Djojoseduro, komisar Central Sarekat Islam, berpendapat bahwa duduknya Cokroaminoto itu ”bukan saja jadi wakil Sarekat Islam, tetapi juga sebagai spesialis yang akan dapat menunjukkan keyakinan, kenyataan, hal keadaan rakyat..” Muis dan Salim pun mempunyai pendapat yang sama. Muis mengatakan bahwa *Volksraad* merupakan forum untuk ”aksi” dan dapat bertindak sebagai ”penasehat” bagi parlemen Belanda serta juga bertindak sebagai ”rem” terhadap anggota-anggota parlemen yang konservatif. Akhirnya cabang-cabang Sarekat Islam

lokal dan Centraal Sarekat Islam menyetujui pengangkatan Cokroaminoto ini (Noer, 1996: 130).

Namun masalah partisipasi dalam *Volksraad* menghangat kembali setelah penolakan dewan tersebut atas mosi Sarekat Islam untuk mengurangi luas tanah yang dipergunakan bagi penanaman tebu dengan 25 persen yang dianggap demi kepentingan rakyat banyak. Penolakan ini membuat beberapa orang pemimpin Sarekat Islam yang semula menyetujui partisipasi organisasi di dalam *Volksraad*, mulai mempersoalkan perlu tidaknya partisipasi ini. Sosrokardono, sekretaris Centraal Sarekat Islam, menuntut agar Cokroaminoto dan Muis meninggalkan dewan tersebut, dengan mengemukakan bahwa partisipasi mereka menyebabkan terpecahnya organisasi. Salim sebaliknya mempertahankan kelanjutan partisipasi organisasi di dalam dewan yang menurutnya merupakan suatu forum latihan tentang masalah-masalah politik, walaupun ia mengakui bahwa nasib bangsa tidak bergantung pada partisipasi ini. Bahkan menurutnya organisasi hanya dapat menarik anggota-anggotanya dari dewan jika kegiatan anggota-anggota ini di dalam dewan melanggar prinsip-prinsip Sarekat Islam.

Sifat politik lain dari Sarekat Islam juga ditunjukkan pada kegiatan-kegiatannya dalam Aksi Ketahanan Hindia (*Indie Weerbaar Actie*) (Noer, 1996: 132), yang awalnya didirikan atas inisiatif pengusaha Belanda yang khawatir bahwa Perang Dunia akan menyebar ke Indonesia dan oleh sebab itu akan menghancurkan kedudukan dan kapital mereka. Mereka berusaha untuk mencari dukungan rakyat banyak dalam tuntutan mereka agar Hindia Belanda mengembangkan kemampuan pertahanannya. Untuk keperluan ini, mereka mengundang organisasi-organisasi termasuk Sarekat Islam, Budi Utomo dan Prinsen Bond (Persekutuan Pangeran-pangeran) untuk bekerja sama.

Weerbaar (ketahanan) ditafsirkan sendiri oleh Sarekat Islam, sehingga mereka menyusun instruksi khusus (mosi) yang akan membekali Muis dan

Dwidjosewojo dari Budi Utomo ke negeri Belanda. Muis ditugaskan untuk menuntut pemerintah agar (Noer, 1996: 133):

”Meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, pertanian, kerajinan dan perdagangan dengan meluaskan pengajaran *vakonderwijs* (pendidikan kejuruan), memajukan peraturan *credietwezen* (perkreditan) dan perserikatan *cooperatie* (koperasi),meluaskan peraturan *irrigatie* (irigasi)...menegakkan pekerjaan buruh yang dilakukan beberapa kepala desa dan satu dua *ambtenaar* (pejabat) Bumiputera...mengubah ketentuan tentang *grondhuur-ordonnantie* (peraturan sewa tanah), agar orang-orang Bumiputera sejajar dengan orang-orang bangsa Eropa”.

Mosi ini diterima oleh 120 Sarekat Islam lokal dan ditolak oleh tiga cabang lainnya, termasuk Sarekat Islam Semarang yang dipimpin Semaun yang dalam periode kedua dari perkembangan organisasi ini senantiasa terus menerus menolak kepemimpinan organisasi, terutama kepemimpinan Muis dan Salim. Pendapat Semaun ini sejalan dengan pendapat *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV), di mana ia menjadi anggotanya. Perkumpulan komunis ini mengemukakan bahwa pemimpin-pemimpin pribumi tertentu, yaitu pemimpin-pemimpin Centraal Sarekat Islam telah dipergunakan sebagai alat propaganda untuk pertahanan militer yang merugikan sebagian besar dari rakyat sendiri. Muis berpendapat bahwa orang-orang ISDV ini mengambil sikap bermuka dua terhadap masalah ini, yaitu bahwa di satu pihak mereka berkata bahwa *Indie Weerbaar* berlawanan dengan kepentingan rakyat banyak, tetapi di lain pihak mereka berusaha untuk memperoleh dukungan golongan proletar Belanda di negeri Belanda terhadap pendapat mereka, yaitu bahwa *Indie Weerbaar* akan menyebabkan bertambahnya pengangguran di negeri Belanda sendiri (Noer, 1996: 133-134).

Jelaslah bahwa tujuan ISDV adalah memancing rakyat banyak untuk memperoleh dukungan kepemimpinan mereka dalam rangka pergerakan rakyat pada umumnya. Mereka merasa cukup jika kepercayaan rakyat pada Sarekat Islam goyah, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pemimpin ISDV, A. Baars (Noer, 1996:

133), bahwa terjadi perdebatan yang menyebabkan kebingungan besar di kalangan rakyat Surabaya sehingga tujuan ISDV pun berhasil.

Konflik antara Sarekat Islam dan ISDV berlanjut pada gerakan buruh yang memang ingin dikuasai oleh kedua belah pihak. Pada kongres ketiga Sarekat Islam tahun 1918, organisasi mendukung pemogokan buruh demi perbaikan nasib, keadilan dan melawan perbuatan yang sewenang-wenang. Bahkan pada kongres keempat tahun 1919, Sarekat Islam memberikan pengarahan mengenai cara-cara mogok. Tidak hanya itu, pemimpin-pemimpin Sarekat Islam juga bergabung dengan serikat-serikat sekerja yang ada untuk memberikan bimbingannya (Noer, 1996: 135). Misalnya Surjopranoto menjadi ketua serikat sekerja pegadaian pada tahun 1919 dan mendirikan serta memimpin *Personeel Fabriek Bond* (PFB), yaitu serikat sekerja gula. Cokroaminoto, Muis dan Salim kemudian juga memberikan bantuannya dalam kepemimpinan pergerakan buruh.

Pada tanggal 15 Desember 1919 berdiri Persatuan Pergerakan Kaum Buruh Hindia (PPKB). Surjopranoto, wakil federasi ini yang juga dipilih sebagai wakil presiden Centraal Sarekat Islam oleh kongres tahun 1919, menginginkan agar kota asalnya, Yogyakarta, dijadikan sebagai pusat federasi tersebut. Keinginan ini menurut Semaun dari ISDV yang menjadi ketua federasi ini adalah upaya untuk mengeluarkan orang-orang komunis. Terjadilah kecaman-kecaman yang bersifat pribadi yang dilancarkan oleh kedua pihak. Kemudian Semaun menyatakan PPKB bubar pada bulan Juni 1921. Ia mendirikan suatu federasi baru, *Revolutionare Vakcentrale*. Pembubaran ini tidak diakui Surjopranoto yang mengadakan rapat lain dan menegaskan kelanjutan dari PPKB dan hanya Semaun dan kawan-kawannya saja yang keluar. Akhirnya serikat kerja pegadaian, salah satu anggota terpenting dari PPKB dan berada di bawah kepemimpinan Cokroaminoto, Muis dan Salim, dalam kongresnya bulan Juli 1921

memutuskan untuk menghentikan segala hubungan dengan pihak komunis (Noer, 1996: 136).

Masuknya Pengaruh Komunisme

Sarekat Islam yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarakan oleh H.J.F.M Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (*Indische Sociaal-Democratische Vereeniging*) pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai "Blok di dalam", mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh Sarekat Islam oleh karena dengan tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda.

Adapun faktor-faktor yang mempermudah infiltrasi ISDV ke dalam tubuh SI antar lain ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam) diakses tanggal 25 April 2010):

1. Centraal Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya, dalam hal ini Semaoen adalah ketua SI Semarang.
2. Peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multipartai, mengingat pada mulanya organisasi seperti Boedi Oetomo dan SI merupakan organisasi non-politik. Semaoen juga memimpin ISDV (PKI) dan berhasil meningkatkan anggotanya dari 1700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang pada tahun 1917 di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua SI Semarang.
3. Akibat dari Perang Dunia I, hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi kas pemerintah kolonial mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDV.
4. Akibat kemiskinan yang semakin diderita rakyat semenjak Politik Pintu Terbuka (sistem liberal) dilaksanakan pemerintah kolonialis sejak tahun 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang.

Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda Sarekat Islam seperti Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirdjo. Hal

ini menyebabkan SI pecah menjadi "SI-Putih" yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto dan "SI-Merah" yang dipimpin Semaoen. SI-Merah berlandaskan asas sosialisme-komunisme. SI-Putih (H. Agus Salim, Abdul Muis, Suryopranoto) berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan SI-Merah (Semaoen, Alimin, Darsono) berhaluan kiri berpusat di kota Semarang.

3. Periode ketiga (1921-1927)

Tahun 1921 merupakan tahun perubahan Sarekat Islam. Perubahan-perubahan itu antara lain: adanya perubahan pada keterangan asas dari organisasi, struktur baru Sarekat Islam, perpecahan dengan kalangan PKI dan penahanan Cokroaminoto oleh pemerintah yang menyebabkan organisasi mengambil langkah politik hijrah pada periode berikutnya.

a. Perubahan dalam keterangan asas

Prinsip-prinsip dalam keterangan asas organisasi pada periode ketiga ini mencerminkan kecenderungan yang bersifat bermusuhan dengan Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini disebabkan anggapan Sarekat Islam yang menyebutkan bahwa negara-negara Eropa terutama Belanda adalah penyebab dari keadaan yang terus-menerus memburuk di Indonesia. Di samping itu, keterangan asas juga menekankan pentingnya persatuan dari para petani dan pekerja yang diharapkan akan berjuang untuk menghapuskan segala kejahatan dari perbudakan politik dan ekonomi. Mengenai kedudukan Islam dijelaskan dalam keterangan asas bahwa pemerintahan menurut Islam haruslah sebuah pemerintahan rakyat dan modal yang digunakan untuk kepentingan bersama (Noer, 1996: 145-146).

b. Struktur baru Sarekat Islam

Keputusan tentang perubahan struktur Sarekat Islam dihasilkan oleh Kongres ketujuh di Madiun tanggal 17-20 Februari 1923, namun persiapannya telah dilakukan

dua tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar organisasi Sarekat Islam diubah menjadi satu partai yang terdiri dari anggota-anggota inti dari Sarekat Islam lama yang aktif dan memiliki loyalitas yang baik kepada partai. Alasan pokok untuk memulai struktur baru tersebut adalah anggapan bahwa bentuk lama membahayakan kepemimpinan organisasi, karena kedudukan yang banyak sedikitnya bebas dari cabang-cabang Sarekat Islam lokal, sedangkan sebaliknya Centraal Sarekat Islam dianggap bertanggungjawab terhadap segala kekurangan dan kesalahan dari organisasi lokal. Walaupun struktur partai gaya baru telah diterima pada tahun 1923, tetapi baru pada tahun 1927 transformasi yang sesungguhnya selesai dilakukan (Noer, 1996: 147).

Bentuk baru dari Sarekat Islam ini tidak memerlukan pengawasan resmi dari pemerintah sebagaimana Sarekat Islam gaya lama berdiri. Tetapi pendapat-pendapat pihak Belanda terhadap Sarekat Islam gaya baru itu sama saja dengan Sarekat Islam gaya lama, walaupun tidak dikatakan memburuk. Sehingga dalam hubungan ini Partai Sarekat Islam dapatlah dikatakan merupakan lanjutan dari Sarekat Islam gaya lama.

c. Perpecahan dengan kalangan PKI

Pecahnya SI terjadi setelah Semaoen dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muis dan Agus Salim pada kongres SI yang keenam 6-10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih antara SI atau organisasi lain, dengan tujuan agar SI bersih dari unsur-unsur komunis. Hal ini dikhawatirkan oleh PKI sehingga Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun usaha ini tidak berhasil karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara. Saat itu anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persis pun turut pula dikeluarkan, karena disiplin partai tidak memperbolehkannya.

Jurang antara SI Merah dan SI Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern (Partai Komunis Internasional) yang menentang cita-cita Pan-

Islamisme. Pada saat kongres SI Maret 1921 di Yogyakarta, H. Fachruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu Agus Salim mengecam SI Semarang yang mendukung PKI. Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam *beleid* (kebijaksanaan) keuangan Cokroaminoto. SI Semarang juga menentang pencampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karena itu, Cokroaminoto lebih condong ke SI haluan kanan (SI-Putih).

Keputusan mengenai disiplin partai diperkuat lagi dalam kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun. Dalam kongres Tjokroaminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan perubahan nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pada kongres PKI bulan Maret 1923, PKI memutuskan untuk menggerakkan SI-Merah untuk menandingi SI-Putih. Pada tahun 1924, SI-Merah berganti nama menjadi "Sarekat Rakyat".

d. Penahanan Cokroaminoto

Sikap partai Sarekat Islam terhadap pemerintah dalam periode ketiga ini berlawanan dengan periode sebelumnya. Kepercayaan terhadap pemerintah dan kesediaan bekerjasama dengan pemerintah lenyap sama sekali. Hal ini dilatarbelakangi oleh penahanan Cokroaminoto selama tujuh bulan oleh pemerintah dalam tahun 1921-1922, serta harapan partai terhadap pembersihan nama Cokroaminoto yang dituduh terlibat dalam Sarekat Islam *afdeling B*⁴. Sebagai akibatnya kongres partai tahun 1923 membicarakan kemungkinan Sarekat Islam mengundurkan diri dari partisipasinya dalam *volksraad*, walaupun akhirnya Cokroaminoto dibebaskan.

Pada tanggal 8-10 Agustus 1924 Sarekat Islam mengadakan kongres di Surabaya yang akhirnya memutuskan bahwa partai tidak akan mempunyai seorang wakil pun di dalam *volksraad* (Noer, 1996: 150). Keputusan ini diambil karena

⁴ Sarekat Islam *Afdeling B* merupakan suatu organisasi yang tertutup dan dapat dikatakan organisasi bawah tanah yang secara resmi tidak mempunyai hubungan apapun juga dengan Sarekat Islam

pemerintah tidak memperdulikan harapan partai tentang pengangkatan Cokroaminoto sebagai anggota dewan. Kongres juga melarang para anggota Sarekat Islam untuk melakukan hubungan langsung dengan dewan, kecuali melalui anggota oposisi di dalam *volksraad*. Seorang anggota Sarekat Islam, Suroso yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai anggota *volksraad*, diminta partai untuk berhenti sebagai anggota partai.

Dalam gerakan nasional keseluruhan Sarekat Islam tidak lagi menempati posisi posisi yang menentukan. Di samping menurunnya kekuatan partai, hal ini juga disebabkan oleh perubahan hubungannya dengan partai-partai lain yang tidak lagi bersifat bersahabat erat sebagaimana periode sebelumnya. Tindakan disiplin partai Sarekat Islam terhadap partai lain merupakan cerminan hubungan ini. Bahkan pada tahun 1926 terjadi pertikaian antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah, yang menyebabkan pihak Sarekat Islam mengambil langkah disiplin terhadap Muhammadiyah (yaitu bahwa anggota-anggota Muhammadiyah akan dikeluarkan dari partai atau bila menghendaki tetap di dalam partai, mereka harus meninggalkan Muhammadiyah) pada tahun berikutnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya status keanggotaan rangkap dalam Sarekat Islam.

4. Periode keempat (1927-1942)

Periode transisi untuk mendirikan Partai Sarekat Islam dan menghapuskan struktur lama selesai dalam tahun 1927. Pada periode ini perhatian Sarekat Islam lebih difokuskan pada persoalan-persoalan teori dan falsafah. Peristiwa penting (Noer, 1996: 154) yang menyebabkan semakin pecahnya Sarekat Islam adalah keputusan untuk mengeluarkan semua anggota Muhammadiyah dari lingkungan organisasi. Perpecahan di dalam organisasi Sarekat Islam ini tidak dapat dipulihkan lagi pada waktu-waktu kemudian.

Tahun 1927 juga mencatat pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Sukarno dan dengan demikian di Indonesia dimulailah sebuah partai yang menantang

kedudukan Sarekat Islam dalam rangka pergerakan perjuangan kemerdekaan. Sikap Sarekat Islam (dalam tahun 1929 namanya diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia) terhadap pemerintah tetap bermusuhan. Politik hijrah dijalankan dengan lebih tegas, walaupun dengan tidak terlalu konsisten. Sebab partai bersama-sama dengan organisasi politik lain menuntut berdirinya suatu parlemen di Indonesia yang berarti kerjasama (kooperasi) dengan pihak Belanda.

Pada kongres PSI tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional (http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam diakses 25 April 2010). Karena tujuannya yang jelas itulah PSI ditambah namanya dengan Indonesia sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pada tahun itu juga PSII menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Akibat keragaman cara pandang di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, di antaranya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya. Aspirasi dari banyak anggota organisasi pendidikan dan sosial Islam yang dahulunya disalurkan melalui PSII diakomodasi oleh partai baru, Partai Islam Indonesia.

Kemunduran Sarekat Islam yang ditandai dengan pecahnya Sarekat Islam menjadi dua, yaitu SI-Putih dan SI-Merah disebabkan masuknya pengaruh komunisme dalam tubuh SI. Pendapat lain menyatakan bahwa penyebab SI mundur adalah (http://www.zamrudkatulistiwa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=57&limitstart=3 diakses tanggal 25 April 2010): *pertama*, akibat pasang-naiknya kekuatan sayap kiri SI yang revolusioner, yang bermuara pada maraknya SI-Merah yang bergabung dengan PKI. *Kedua*, akibat pasang-naiknya pengaruh modernisme dalam Islam, yang terwujud dengan makin besarnya pengaruh

Muhammadiyah. *Ketiga*, penerapan disiplin partai (melarang keanggotaan rangkap), dan *keempat*, timbulnya PSI (Partai Sarekat Islam).

Seorang orientalis, G.H. Jansen, pernah menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan kemunduran Sarekat Islam. Programnya merupakan kombinasi yang kurang serasi antara Islam yang agak konservatif dengan anti kolonialisme yang keras. Kombinasi ini akhirnya menghancurkan kesatuan di dalam diri organisasi itu sendiri dan popularitas organisasi (Jansen, 1983: 25). Tapi sesungguhnya Jansen telah salah besar. Dikotomi yang ia nyatakan, Islam dan anti kolonialisme adalah keliru. Sebab salah satu karakteristik Islam adalah anti kolonialisme. Apalagi dengan mengatakan Islam itu agak konservatif. Ini salah sekali. Karena Islam itu progresif dan *up to date*, selalu relevan sepanjang zaman.

Kesalahan lain Jansen karena ia mengatakan penyebab kehancuran SI adalah kombinasi yang kurang serasi antara Islam dengan anti kolonialisme. Padahal penyebabnya (penyebab utama) adalah infiltrasi dan penetrasi dari orang-orang komunis kepada Sarekat Islam. Mereka mengira Islam dan komunis sama karena sama-sama membela kaum tertindas (*mustadh'afin*). Penyebab membelotnya orang-orang Islam anggota SI ini adalah karena SI kurang memberikan porsi yang cukup untuk membahas Islam secara ilmiah, pembahasan masalah sosial, dan kehidupan sehari-hari secara ilmiah. Sedangkan orang-orang komunis menyentuh bidang akal. Akhirnya hancurlah SI. Tadinya SI adalah sebuah partai politik terbesar di Indonesia/Hindia Belanda kemudian pecah menjadi dua. SI Putih tetap bergaris dan berhaluan Islam, sedangkan SI Merah bergaris dan berhaluan komunis yang nantinya berubah menjadi bagian dari PKI.

Tokoh-tokoh Sarekat Islam

1. Haji Samanhudi

Lahir di desa Sondokoro (Karanganyar, Solo), sebagai seorang anak pedagang batik yang bernama Haji Mohammad Zen. Keluarga ini pindah ke Lawiyan, Solo, ketika Wirjowikoro (nama kecil Samanhudi) berumur dua tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan rendahnya di sekolah kelas dua, Samanhudi membantu ayahnya dalam berdagang batik sampai ia dapat berdiri sendiri dengan membuka perusahaan batik. Ia berhasil dalam bidang ini sehingga ia dapat membuka cabang-cabang perusahaannya di berbagai kota di Jawa. Pada tahun 1904 ia pergi ke Mekkah untuk naik haji dan kembali pada tahun berikutnya. Pada masa itu Samanhudi mempunyai minat yang besar untuk mendirikan berbagai organisasi sosial, umpamanya organisasi-organisasi yang memberikan bantuan dalam upacara perkawinan, keperluan selamatan dan keperluan penyelenggaraan kematian. Walaupun pengetahuannya dalam Islam terbatas, ia sangat beriman. Dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang Muslim yang tipikal pada masanya, yang meyakini Islam sebagai agamanya sendiri. Ia sendiri merasa bahwa gelar kyainya yang sering dihubungkan dengan namanya adalah kurang pada tempatnya (Noer, 1996: 119-120).

2. H.O.S. Cokroaminoto (1882-1934)

H.O.S. Cokroaminoto lahir di desa Bakur, Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882. Ia anak kedua dari dua belas bersaudara, putra dari Raden Mas Cokroaminoto Amiseno, seorang Wedana Kleco dan cucu RT. Adipati Negoro bupati Ponorogo, sebuah keluarga bangsawan dan juga taat beragama.

Setelah menamatkan studi di *Opladying School Foor Inladishe Ambegtenaren* (OSVIA), sekolah pegawai pemerintahan pribumi Magelang, ia mengikuti jejak kepriyain ayahnya menjadi pegawai pemerintah sebagai juru tulis pada Patih Ngawi selama tiga tahun. Ia kemudian menjadi Patih tetapi meninggalkan pekerjaan ini untuk

pindah ke Surabaya pada tahun 1905 dan bekerja pada sebuah perusahaan belanda, di samping itu ia juga belajar di sekolah malam *Hogore Burger School* dalam hal teknik mesin untuk tiga tahun lamanya (1907-1910) dan bekerja sebagai pegawai pada sebuah pabrik gula di luar kota Surabaya pada tahun 1911-1912. Ketika ia didatangi oleh delegasi dari Sarekat Islam Solo untuk bergabung pada organisasi ini, Cokroaminoto telah terkenal dengan sikapnya yang radikal dengan menentang kebiasaan-kebiasaan yang memalukan bagi rakyat banyak. Ia dikenal sebagai seorang yang menganggap dirinya sederajat dengan pihak manapun juga. Bahkan ia disebut sebagai Gatotkacanya Sarekat Islam (Noer, 1996: 121-122).

Untuk merealisasikan perjuangan menuntut Indonesia bersyariat, Cokroaminoto masuk ke dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) yang saat itu dipimpin oleh H. Samanhudi di Solo, sebuah pergerakan pertama Indonesia yang menggelorakan semangat kemerdekaan. Karena memang tujuan SDI adalah kemerdekaan dan pemberlakuan syariat Islam. Semenjak masuknya ia ke dalam SDI, SDI berubah menjadi sebuah organisasi yang besar dan menakutkan bagi kolonial. Kemahirannya serta kepiawaiannya berpolitik dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan memihak kepentingan rakyat membuat SDI begitu di gandrungi rakyat pribumi. Terlebih setelah SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI) dan ia menjadi pemimpin SI. Lewat Cokroaminoto tujuan SI mulai diperjelas yakni kemerdekaan Indonesia dan pemberlakuan Syariat Islam bagi segenap lapisan rakyat. Karena aktifitas politiknya (<http://forum.detik.com/showthread.php?t=107418> diakses tanggal 25 April 2010), Belanda akhirnya menangkap Cokroaminoto pada tahun 1921 karena dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perjuangan rakyat pribumi walaupun akhirnya dibebaskan pada tahun 1922, sebuah cobaan yang lazim diterima para penegak syariat Islam di seluruh dunia.

Pada tanggal 14-24 juni 1916 diadakanlah kongres Nasional pertama di Bandung. Di dalam kongres tersebut Cokroaminoto mengupas tentang pembentukan bangsa dan pemerintahan sendiri. Sebuah langkah yang sangat berani saat itu karena bagi rakyat pribumi kemerdekaan adalah hal yang tabu untuk disampaikan. Suatu langkah politik yang benar-benar berani. Cokroaminoto membangun opini rakyat yang belum mengerti politik untuk berpihak terhadap perjuangannya. Yaitu menuntut Indonesia merdeka dan bersyariat Islam. Di tengah pemerintah kolonial yang masih kuat apalagi saat itu Belanda masih menerapkan peraturan *Reegerings Reglement* (RR) sebuah peraturan yang berisi larangan berpolitik, berkumpul untuk membahas perjuangan kemerdekaan. Yang otomatis Cokroaminoto saat itu harus berhadapan dengan dua lawan yaitu Belanda dan *Pangreh Praja* yang menjadi kaki tangan Belanda.

Pada tahun 1924, Cokroaminoto mulai aktif dalam komite –komite pembahasan kekhilafahan yang dicetuskan pemimpin politik Wahabiah Arab, Ibnu Saud. Sebuah langkah untuk memperkuat barisan menuju kemerdekaan dan kekhilafahan dunia. Akhirnya beliau wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta, dan dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta (al-ikhwah Edisi 3 Tahun I ~ Maret 2009 M / Rabiul Awwal 1430 H).

Bagi Cokroaminoto, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipersatukan, sebagai dasar kebangsaan yang hendak di proses menuju Indonesia. Tipikal Cokroaminoto, identik dengan AI-Afghani yang juga merupakan tokoh politik Pan-Islamisme (kebangkitan Islam). Cokroaminoto dan Afghani juga sama-sama mengalami kegagalan dalam perjuangan Pan-Islamismenya. Namun, arti penting keduanya bukan pada kemenangan atau kekalahan. Keduanya menjadi penting karena menggulirkan momentum perubahan pemikiran dalam Islam. Keduanya juga menjadi ruh perjuangan bagi kepentingan politik Islam.

3. H. Agus Salim (1884-1954)

Agus Salim dilahirkan di Kota Gadang, Bukittinggi, pada 8 Oktober 1884 dan wafat di Jakarta tahun 1954. Ketika dilahirkan ia bernama Masyudul Haq, nama seorang tokoh dari sebuah buku yang dibaca ayahnya, Sutan Mohammad Salim. Ketika Agus berusia 6 tahun, ayahnya menjadi jaksa tinggi pada pengadilan untuk daerah Riau dan sekitarnya. Agus diterima pada sekolah dasar Belanda ELS (*Europeese Lager School*). Setelah lulus dari ELS ia dikirim ke Batavia untuk belajar di HBS (*Hogere Burger School*). Ia lulus dengan angka tertinggi tidak saja di sekolahnya, tetapi juga untuk sekolah HBS lain (Bandung dan Surabaya). Namanya menjadi terkenal di seantero Hindia Belanda di kalangan kaum kolonial dan terpelajar. Kemudian ia bekerja pada konsulat Belanda di Jeddah sebagai penerjemah dan mengurus urusan haji dari tahun 1906 sampai tahun 1909. Di kota ini ia memperoleh kesempatan untuk memperdalam ilmu agama (Islam). Sepulang dari Tanah Suci, Salim sempat bekerja pada dinas pekerjaan umum (1911-1912). Namun, ia keluar dari birokrasi Belanda dan mendirikan sekolah dasar (HIS) di kampungnya di Kota Gadang. Hanya sebentar, ia kemudian berangkat lagi ke Jakarta dan selanjutnya terjun ke dunia politik melalui Sarekat Islam (Noer, 1996: 123).

Ia berhubungan dengan organisasi ini pada tahun 1915 sebagai seorang ”anggota seksi politik dari kepolisian”. Ia tidak populer dalam periode pertama Sarekat Islam, tetapi ia berhasil untuk mencapai suatu kedudukan kepemimpinan dalam periode-periode berikutnya, terutama dalam membentuk dan memberi isi pada Sarekat Islam dengan warna Islamnya (Noer, 1996: 123).

Semasa penjajahan Belanda, ia memang tidak pernah ditangkap Belanda. Baru setelah Indonesia merdeka ia beberapa kali diasingkan bersama dengan pemimpin nasional lainnya. Mengapa Belanda tidak menangkapnya? Salah satu kemungkinan jawabannya adalah terletak pada gaya bahasa Agus Salim yang kritis dan tajam, tetapi

disampaikan secara halus tapi cerdas. Ia beberapa kali menjadi pengelola surat kabar dan sangat produktif menulis baik tajuk rencana maupun artikel lainnya.

4. Abdul Muis (1878-1959)

Abdul Muis dilahirkan di Sungai Puar-Bukittinggi, pada 3 Juli 1878 dan wafat di Bandung, tanggal 17 Juni 1959. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada sebuah sekolah Belanda di Bukittinggi serta bagian persiapan sekolah STOVIA di Jakarta. Kemudian ia bekerja pada Departemen Pendidikan sebagai seorang juru tulis (1903-1905) dengan bantuan direktur departemen tersebut J.H. Abendanon, tetapi meninggalkan pekerjaan ini karena ia tidak menyukai lingkungan kerjanya yang pada umumnya didominasi oleh orang-orang Indo dan orang-orang yang pada umumnya memandang rendah penduduk asli rendah. Setelah bekerja untuk beberapa lama di Bank Rakyat (*Volkscredietwezen*), ia menjadi wartawan dengan memimpin edisi Indonesia dari Bintang Hindia, sebuah majalah progresif yang dipimpin oleh Dr. Abdul Rivai, sampai penerbitan ini terhenti karena kesulitan keuangan. Kemudian ia bekerja pada sebuah koran Belanda *A.I.D. Preanger Bode*, tetapi melepaskan pekerjaan ini ketika ia tidak dibenarkan oleh perusahaan penerbitan koran ini untuk mengantarkan isterinya ke Tanjung Priok untuk naik haji. Ia kemudian mendirikan *Kaum Muda*, di sinilah ia mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat Islam. Namanya mulai dikenal oleh masyarakat ketika karangannya yang banyak dimuat di harian *de Express* selalu mengecam tulisan orang-orang Belanda yang sangat menghina bangsa Indonesia. Pengalaman organisasi Abdul Muis menyiratkan perjuangannya yang pantang menyerah. Menjadi salah satu dari Pengurus Besar Sarekat Islam, Pendiri Komite Bumiputera, Pendiri Persatuan Perjuangan Priangan, serta Anggota Komite Indie Weerbaar

(<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/c/index.shtml> diakses tanggal 25 April 2010).

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda dilakukan Abdul Muis tanpa putus-putus dengan berbagai cara. Dengan ‘pena’-nya yang tajam, partai politik, komite perlawanan orang pribumi, bahkan memimpin mogok kerja. Sebagai seorang wartawan, tulisan Abdul Muis merupakan tulisan perlawanan terhadap Belanda. Ia mengecam tulisan orang-orang Belanda yang sangat menghina bangsa Indonesia melalui tulisannya di harian *de Express*, begitu juga sebagai Pengurus Besar Sarekat Islam, ia selalu menanamkan semangat perlawanan kepada anggotanya. Ia juga mendirikan Komite Bumiputera bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya sebagai perlawanan terhadap rencana Pemerintah Belanda yang akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke seratus di Indonesia. Tidak sampai di situ, ia bahkan memimpin pemogokan kaum buruh di daerah Yogyakarta.

Tokoh yang menjadi utusan ke Negeri Belanda sebagai anggota Komite Indie Weerbaar sehubungan dengan terjadinya Perang Dunia pertama ini, juga merupakan tokoh di belakang cikal bakal berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB), ia mempengaruhi tokoh-tokoh Belanda dalam pendirian *Technische Hooge School* yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Pejuang yang juga terkenal sebagai sastrawan ini, hingga Indonesia merdeka tetap melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan.

Untuk mengefektifkan perjuangannya, ia selanjutnya terjun berpolitik praktis dengan menjadi anggota Sarekat Islam. Di organisasi tersebut ia diangkat menjadi salah seorang anggota Pengurus Besar. Kepada anggota sarekat, ia selalu menanamkan semangat perjuangan melawan penjajahan Belanda. Bahkan ketika Kongres Sarekat Islam diadakan pada tahun 1916, ia menganjurkan agar Sarekat Islam (SI) bersiap-siap menempuh cara kekerasan menghadapi Belanda jika cara lunak tidak berhasil.

Perlawanan tidak hanya ditujukannya kepada Pemerintahan kolonial Belanda, tapi terhadap ajaran-ajaran yang tidak disetujuinya. Seperti selama kesertaannya di Sarekat Islam, ia selalu berjuang agar diadakan disiplin partai, yang intinya untuk mengeluarkan anggota-anggota yang sudah dipengaruhi oleh paham komunis.

Pada tahun 1913, ia bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya seperti Ki Hajar Dewantara, mendirikan Komite Bumiputera. Komite ini dibentuk awalnya adalah untuk menentang rencana Pemerintah Belanda mengadakan perayaan peringatan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Rencana Pemerintah Belanda tersebut memang sesuatu yang ironis. Di negeri yang sedang di jajahnya, mereka hendak merayakan hari kemerdekaannya secara besar-besaran. Itulah yang ditentang oleh para tokoh pergerakan nasional tersebut. Namun oleh karena perlawanan itu, ia akhirnya ditangkap oleh Pemerintah Belanda. Ketika Perang Dunia I terjadi, bangsa ini pun siap sedia mengatasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Untuk itu, pada tahun 1917, Abdul Muis diutus ke Negeri Belanda sebagai anggota Komite Indie Weerbaar guna membicarakan masalah pertahanan bagi bangsa Indonesia (<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/c/index.shtml> diakses tanggal 25 April 2010).

Abdul Muis terkenal sebagai orang yang selalu membela kepentingan rakyat kecil. Ia sering berkunjung ke daerah-daerah untuk membela rakyat kecil tersebut sambil membangkitkan semangat para pemuda agar semakin giat berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia.

Melawan Belanda sepertinya ia tidak kehabisan ide, berbagai cara perlawanan pernah dilakukannya termasuk mengajak kaum buruh untuk melakukan mogok. Seperti yang dilakukannya pada tahun 1922, ia memimpin pemogokan kaum buruh di daerah Yogyakarta. Karena tindakannya itu, ia kembali ditangkap oleh Pemerintah Belanda dan mengasingkannya ke Garut, Jawa Barat. Di samping terkenal sebagai pejuang

kemerdekaan, ia juga terkenal sebagai seorang sastrawan Indonesia. Karya sastra yang berjudul “Salah Asuhan” yang sangat terkenal itu merupakan salah satu dari karyanya. Sang Pahlawan Pergerakan Nasional dan Sastrawan yang hingga kemerdekaan ini tetap tinggal di Jawa Barat berprinsip bahwa perjuangan tidak pernah berhenti (<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/c/index.shtml> diakses tanggal 25 April 2010). Setelah kemerdekaan ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan, suatu persatuan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Juni 1959, pahlawan ini meninggal di Bandung dan dimakamkan di sana juga

BAB V

Simpulan

Rekapitulasi dan Diskusi

Periode tahun 1920-an merupakan periode kelam dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Pada kurun waktu ini, lahir Sarekat Islam Merah yang berhaluan komunis yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yaitu: faktor intern yang terdiri dari pengaruh golongan radikal dan Sarekat Buruh dalam Sarekat Islam Semarang, perbedaan asas antara anggota Sarekat Islam, lemahnya kontrol organisasi dalam Sarekat Islam dan kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia. Serta faktor ekstern, antara lain: adanya pengaruh paham Sosialisme-Revolusioner yang dibawa oleh Sneevliet dan infiltrasi dari ISDV yang dilancarkan dari dalam tubuh Sarekat Islam sehingga melemahkan dan menimbulkan perpecahan dalam organisasi yang turut mendukung tumbuh suburnya paham komunis.

Dalam perkembangannya, Sarekat Islam Merah mengalami tiga periode, yaitu *Pertama*, periode awal dimulai pada tahun 1920-1921, di mana Sarekat Islam Merah masih menjadi bagian dari Sarekat Islam. *Kedua*, periode menengah tahun 1921-1924, pada periode ini Sarekat Islam Merah telah memisahkan diri dan berdiri sebagai organisasi tersendiri, terpisah dari Sarekat Islam, yang kemudian merubah nama menjadi Sarekat Rakyat yang merupakan bangunan bawah dari PKI. *Ketiga*, periode akhir tahun 1924-1926, di mana Sarekat Rakyat bubar pada 26 April 1926.

Dalam proses perkembangan Sarekat Islam Merah, terjadi persinggungan antara Islam dan komunis. Dalam Setiap ideologi, baik agama atau anti agama, selalu berkisar di seputar manusia; dan memang di sinilah komunisme amat berbeda dengan Islam. Perbedaan yang makin besar ini merupakan akibat alamiah dari dua pandangan dunia yang bertentangan, yang melahirkan kedua golongan ini, dan yang mendasari keseluruhan sikap mereka dalam menafsirkan semua gejala. Dengan titik tolak inilah

Islam dan komunisme terbukti tak dapat rukun berdampingan dalam semua bidang: politik, ekonomi, etika dan sosial. Manusia dalam perspektif Islam dinilai dengan dasar *tauhid*, sedangkan Komunisme menilai manusia berdasarkan perspektif *taulid* (produksi).

Titik Singgung antara komunisme dan Islam dalam berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek Teologi

Komunisme mengusung Humanisme yang membawa masyarakat pada cita-cita kemanusiaan dan keadilan, perdamaian dan persaudaraan. Dan Islam mengusung Humanisme pada kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*) dan kesatuan pedoman hidup (*unity of guidance*)

2. Aspek Sosial

Pada aspek ini, komunisme melakukan perjuangan sosial demi menegakkan keadilan masyarakat sebagai sebuah kewajiban, tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat, menghormati Hak Asasi Manusia dan berjuang menenyapkan berbagai bentuk penindasan. Islam memiliki konsep tersendiri yang tercantum dalam Al-Qur'an, antara lain Konsep keadilan kolektif (*al-'adâlah*): Q.S. 57: 25; 4: 40, 58; 49: 9; 5: 42, 8; 83: 1-3; Konsep persamaan (*al-musâwah*): Q.S. 49: 13; 17: 70, Masyarakat tanpa kelas: Q.S. 23: 52; Konsep kebebasan (*al-hurriyah*): Q.S. 2: 256; 18: 29; 7: 72; 35: 18; 53: 39; 48: 4; 49: 13; 10: 99; 8: 10 dan Islam sebagai agama pembebasan terhadap penindasan: Q.S. 81: 8-9.

3. Aspek Politik

Pada aspek politik, komunisme meletakkan kekuasaan dan kepemimpinan berada pada golongan rakyat, khususnya proletar, bukan pada golongan borjuis. Maka Islam menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, memihak kaum *mustadh'afin* (tertindas) dalam perjuangan melawan golongan *mustakbirin* Q.S. 28: 5-6.

4. Aspek Ekonomi

Kapitalisme menjadi musuh bersama bagi komunisme dan Islam pada aspek ekonomi. Sosialisme menjadi salah satu yang diperjuangkan oleh komunisme, demikian halnya Islam yang tercantum dalam Q.S. 2: 188; 6: 145; 104: 1-4

Sementara perbedaan antara komunisme dan Islam dalam berbagai aspek secara jelas adalah sebagai berikut:

1. Sumber Ideologi

Pada tataran ideologi, komunisme bersumber pada buatan akal manusia yang penuh keterbatasan, sedangkan ideology Islam bersumber pada Wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW.

2. Dasar *qiyadah fikriyah* (pemikiran prioritas/kepemimpinan berfikir)

Dasar pemikiran dalam komunisme adalah materialisme dan evolusinya. Sedangkan Islam mendasarkannya pada *Laa Ilaha illallah*, yaitu menyatukan antara hukum Allah SWT dgn kehidupan (Aqidah Islam).

3. Pembuat Hukum dan Aturan

Dalam komunisme, pembuat hukum dan aturan adalah manusia, namun bagi Islam adalah Allah melalui Wahyu.

4. Fokus

Negara di atas segalanya. Individu merupakan salah satu gigi roda dlm roda masyarakat yg berupa sumber daya alam, manusia, barang produksi (satu kesatuan yaitu materi). Inilah yang menjadi fokus bagi komunisme. Sementara Islam menganggap Individu sebagai salah satu anggota/bagian masyarakat (masyarakat=kumpulan manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan)

5. Ikatan Perbuatan

Komunisme mengusung kebebasan dalam hal perbuatan namun tidak ada kebebasan dalam hal kepemilikan. Lain halnya dengan Islam di mana seluruh

perbuatan terikat dengan hukum syara'. Perbuatan baru bebas dilakukan bila sesuai dengan hukum syara'.

6. Tolak ukur kebahagiaan

Yang menjadi tolak ukur dalam hal kebahagiaan bagi komunisme adalah meraih sebanyak-banyaknya materi berupa harta, pangkat, kedudukan. Berbeda dengan Islam, yaitu mencapai *ridha* Allah SWT yang terletak dalam ketaatan terhadap-Nya pada setiap perbuatan.

7. Penerapan hukum

Hukum dalam komunisme diterapkan dengan “tangan besi” dari negara (otoriter). Sedangkan dalam Islam, penerapan hukum itu atas dasar ketaqwaan individu, kontrol masyarakat dan penerapan dari masyarakat (penerapan hukum pada masyarakat oleh negara)

8. Kebebasan pribadi

Mendewakan kebebasan pribadi demi meraih kebahagiaan adalah kebebasan pribadi menurut komunisme. Tidak demikian halnya menurut Islam, kebebasan pribadi distandarisi oleh hukum *syara'*. Bila sesuai bebas dilakukan, bila tidak maka tidak boleh dilakukan.

9. Dasar perekonomian

Dalam komunisme, perekonomian berada sepenuhnya di tangan negara. Tidak ada sebab pemilikan, semua orang boleh mencari kekayaan dengan cara apapun. Namun jumlah kekayaan yang boleh dimiliki dibatasi. Sangat berbeda dengan konsep perekonomian Islam, di mana setiap orang bebas menjalankan perekonomian dengan membatasi sebab pemilikan dan jenis pemilikinya. Sedangkan jumlah kekayaan yang boleh dimiliki tidak dibatasi.

10. Kemunculan sistem aturan

Bagi komunisme, sistem aturan itu diambil dari alat-alat produksi. Sedangkan bagi Islam dinyatakan bahwa Allah telah menjadikan bagi manusia sistem aturan untuk dijalankan dalam kehidupan yang diturunkan pada nabi Muhammad SAW. Manusia hanya memahami permasalahan, lalu menggali hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

11. Tolak ukur

Tolak ukur dalam komunisme adalah materi. Sedangkan yang menjadi tolak ukur dalam Islam adalah halal dan haram.

Persamaan mendasar dari keduanya adalah sebagai ideologi, komunisme dan Islam sama-sama memikirkan kehidupan manusia di dunia yang tertuju pada kesejahteraan hidup. Namun jika komunisme hanya tertuju pada kesejahteraan hidup di dunia, maka tidak demikian halnya dengan Islam yang tertuju pada keselamatan di dunia dan akhirat.

Implikasi Teori

Kekhawatiran akan bahaya komunisme seharusnya dimulai dengan upaya menghapus kondisi yang dapat menyuburkan komunisme itu sendiri. Kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan diskriminasi perlakuan hukum adalah beberapa contoh kondisi yang memungkinkan hadirnya komunisme di negeri ini. Sebagai ide, komunisme telah menawarkan sejumlah gagasan perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sistem sosial.

Perpecahan organisasi yang dialami Sarekat Islam memberikan pelajaran nyata, bahwa dalam hal mendasar seperti proses rekrutmen anggota harus benar-benar dilakukan dengan serius untuk meminimalkan anggota yang nantinya dapat merusak organisasi dari dalam.

Bagi Islam sendiri, ancaman bahaya komunis tidak seharusnya hanya diwujudkan dengan fatwa anti komunis, tetapi dimulai dari umat Islam sendiri dengan

lebih memahami ajaran Islam secara komprehensif dan langkah konkret lain, yaitu menghapus biang yang menyuburkan komunisme: kemiskinan dalam aspek yang luas.

Arah untuk Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Sarekat Islam Merah masih dapat dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti lain yang berminat pada kajian ini. Penulis merekomendasikan peneliti untuk meneliti aspek-aspek lain dari Sarekat Islam Merah, misalnya komparasi pemikiran politik antara Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih.